

Laporan National Kawula17 Survey (NKS) Q4 2025



**Kinerja Pemerintah dan Legislatif
serta Opini Publik**



Daftar Isi

<u>Perkenalan.....</u>	3
<u>Metodologi.....</u>	6
<u>Temuan.....</u>	9
<u>Isu Prioritas.....</u>	20
<u>Penilaian Kinerja Pemerintah.....</u>	26
<u>Ekspektasi terhadap Pemerintahan.....</u>	31
<u>Pantauan Partai Politik.....</u>	42
<u>Opini Publik terhadap RUU Berjalan.....</u>	48
<u>Persepsi Masyarakat Terhadap Bencana di Sumatera.....</u>	58
<u>Lampiran.....</u>	54



Sumber: Storyset



Perkenalan



Sumber: Storyset

Tentang Yayasan Pelopor Pilihan Tjuhbela

Apa itu Yayasan PP17?

Yayasan Pelopor Pilihan Tjuhbela (PP17) lahir atas kekhawatiran sekaligus harapan kami untuk meningkatkan partisipasi anak muda di arena politik. Politik yang kami bayangkan tidak melulu tentang jalur formal, tetapi juga untuk memahami pilihan politik yang termanifestasi dalam pilihan hidup sehari-hari.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi anak muda, PP17 memiliki beberapa inisiatif program, di antaranya adalah **Survei Nasional Kawula17** yang kami lakukan di tiap kuartal untuk memantau posisi partai politik dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu terkini. Pemantauan regular ini dilakukan untuk memetakan dan memberikan gambaran yang representatif terhadap posisi masyarakat Indonesia terkait isu-isu terkini yang juga dibahas di DPR.

PP17 juga meluncurkan **Kawula17.id** yang merupakan [Voting Advice Application \(VAA\)](#). Melalui Kawula17.id, (calon) pemilih bisa memeriksa pilihan partai politik yang paling sesuai dengan nilai-nilai politik pemilih berdasarkan isu sosial ekonomi yang diusung oleh partai tersebut di kurun waktu tertentu. Isu-isu yang diangkat harus relevan terhadap kebutuhan pemilih dan dinamis.

Bagaimana [VAA Kawula17.id](#) bekerja?

Secara sederhana, VAA dapat diibaratkan seperti kuis yang terdiri dari beberapa set pertanyaan yang disediakan bagi para *users*. Pertanyaan-pertanyaan ini berisi isu maupun kebijakan yang saat ini sedang dibahas di DPR, serta ramai di kalangan publik. **Pemetaan posisi partai politik** dilakukan di masing-masing isu. Posisi ini didapatkan melalui **desk research** di portal berita maupun **konfirmasi langsung dengan perwakilan partai**. Posisi-posisi partai teridentifikasi menjadi dasar pembuatan VAA. Dari jawaban-jawaban yang terkumpul, Kawula17 mencoba untuk **memetakan pilihan** publik dengan sikap partai politik di masing-masing isu yang tersedia. Hasil penelitian ini digunakan untuk menjaga VAA Kawula17 tetap *up to date*.



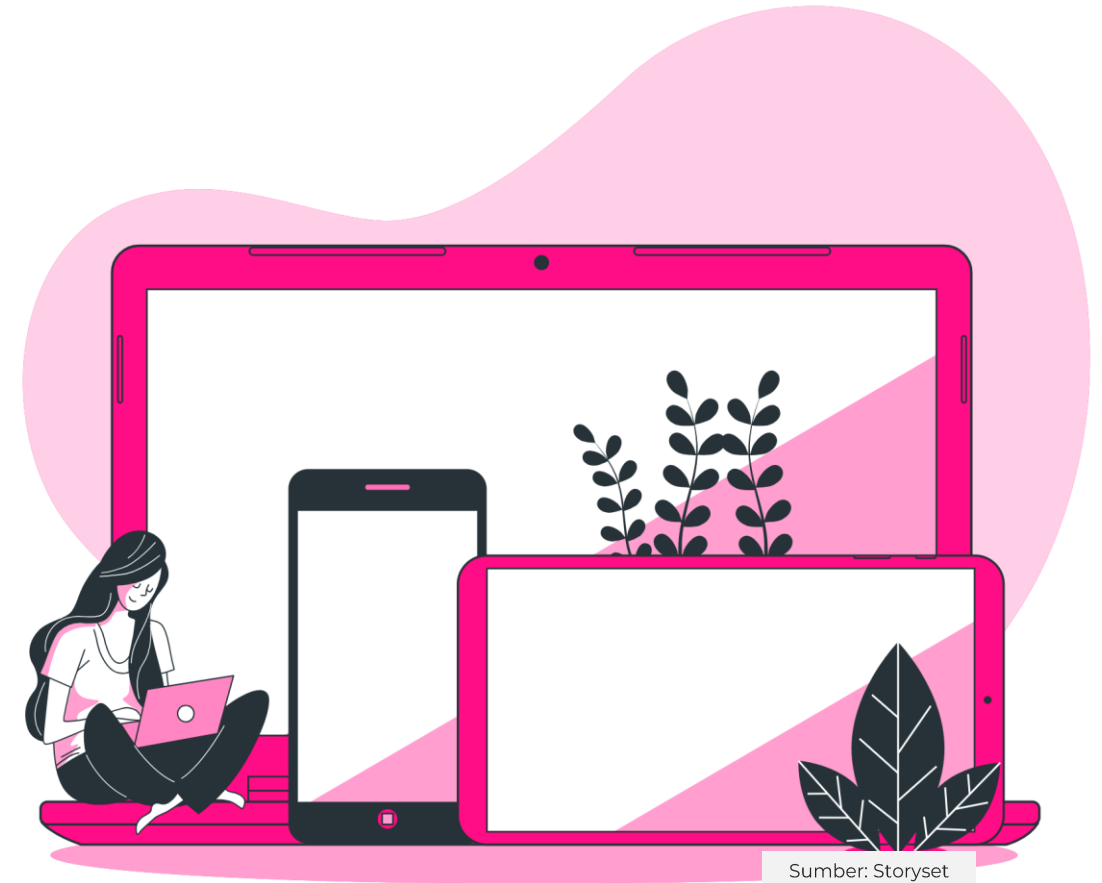
Sumber: Storyset

Tentang Survei Nasional Kawula17

National Kawula17 Survey (NKS) atau Survei Nasional Kawula17 bertujuan untuk mendorong diskusi, kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap kondisi terkini. NKS dilakukan empat kali dalam setahun atau untuk melihat tren yang terjadi di masyarakat. Publikasi untuk setiap laporan NKS dapat diakses melalui website **Kawula17.id**.

Pada kuartal ketiga tahun ini, Kawula17 mempublikasikan laporan NKS yang berisi tentang:

1. Isu prioritas masyarakat.
2. Penilaian kinerja pemerintah.
3. Ekspektasi terhadap pemerintah.
4. Pantauan partai politik.
5. Opini masyarakat terkait beberapa RUU di Prolegnas.
6. Persepsi masyarakat pascabencana banjir dan longsor di Sumatera.





Metodologi



Desain Penelitian

Tujuan



- Memahami sikap masyarakat terhadap:
- ✓ Isu terkini yang sedang berkembang.
 - ✓ Program dan kinerja pemerintah.
 - ✓ Prioritas isu untuk segera diselesaikan.
 - ✓ Beberapa RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional.
 - ✓ Bencana banjir-longsor di wilayah Sumatera.

Periode



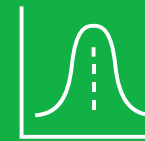
16 – 19 Januari 2026

Metode



Computer-Assisted Self Interviewing (CASI)
atau survei daring

Sampling



n = 400 responden*
Umur: 17 – 44 tahun
Area: Indonesia

**representatif untuk Indonesia*

Profil Responden

base: all, n = 400*

Jenis kelamin	
Perempuan	48%
Laki-laki	50%
Tidak mengatakan	2%

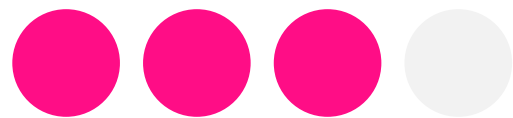
Umur	
17 – 24 tahun	30%
25 – 34 tahun	36%
35 – 44 tahun	34%

Pendidikan	
SMP/SMA	85%
Perguruan Tinggi	15%

Wilayah	
Sumatera	19%
Jawa	54%
Lainnya	27%

Area	
Perkotaan	57%
Pedesaan	43%

**Untuk memastikan hasil yang representatif bagi Indonesia, data telah diberi bobot berdasarkan jenis kelamin, usia, dan wilayah. Agar "effective base" optimal, faktor bobot dibuat di bawah 2.*



Temuan



Temuan (1)



Pantauan Partai Politik

Hasil Survei Nasional Kawula17 pada Q4 2025 menunjukkan bahwa Partai Gerindra masih mempertahankan posisinya sebagai pilihan teratas masyarakat (38%). Sementara itu, Perindo (4%) menjadi satu-satunya partai non-parlemen yang saat ini memperoleh suara lebih dari sama dengan 4%, sehingga memungkinkan Perindo untuk masuk ke parlemen apabila pemilihan dilaksanakan pada Q4 2025.



Penilaian Kinerja Pemerintah

Pada kuartal keempat 2025, skor **kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 5,7**, meningkat dari Q3 2025 dengan +0,6 poin. Penilaian masyarakat terhadap kemiskinan, penanggulangan bencana, ketenagakerjaan, dan ekonomi masih negatif, dengan NET score kemiskinan -27%, penanggulangan bencana -6%, serta ekonomi dan ketenagakerjaan yaitu -2%.

Ketidakpuasan masyarakat juga terlihat dalam kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji ASN (29%) yang terekam sejak Q3 2025. Selain itu, 61% masyarakat merasa (sangat) tidak puas dengan program perluasan perkebunan sawit di Papua dan 58% (tidak puas) dengan pemenuhan janji 19 juta lapangan pekerjaan.



Isu Prioritas Masyarakat

Isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi masih menjadi prioritas utama masyarakat, dengan topik ekonomi (58%), kemiskinan (55%), dan pemberantasan korupsi (49%) sebagai tiga topik teratas. Isu ekonomi secara konsisten menjadi salah satu topik teratas bagi masyarakat sejak Q1 2025 (60%), Q2 2025 (52%), dan Q3 2025 (57%). Hal ini menunjukkan tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia.

Secara spesifik, isu-isu umum yang dianggap masyarakat perlu segera diselesaikan adalah mengenai penggunaan anggaran negara yang kurang transparan dan maraknya kasus korupsi (54%). Isu ini mengalami peningkatan signifikan (+7%) dari Q3 2025. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi (52%) dan inefisiensi penanganan banjir-longsor di Sumatera (48%) juga dianggap mendesak untuk segera diselesaikan oleh pemerintah.

Pada isu lingkungan, masyarakat menganggap proyek tambang yang merusak lingkungan (39%) dan pembukaan hutan untuk perkebunan sawit (39%) perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Selain kedua isu tersebut, banjir dan air rob (28%) menjadi isu yang secara signifikan meningkat fokusnya dibandingkan Q3 2025 (+8%). Ketiga isu ini menjadi fokus utama masyarakat, dipicu oleh maraknya berita bencana banjir-longsor di Sumatera.

Temuan (2)



Ekspektasi terhadap Pemerintah

Secara umum, masyarakat Indonesia masih merasa (sangat) yakin (49%) terhadap upaya pemerintah dalam memenuhi janji dan programnya.

Bagi masyarakat yang optimis, faktor utama yang mendasari keyakinannya terhadap pemenuhan program dan kebijakan pemerintah terletak pada karakter Prabowo yang tegas (52%), dukungan kuat masyarakat (46%), dan perencanaan program yang matang (40%).

Di sisi lain, mereka yang (sangat) tidak yakin (51%) umumnya karena maraknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat (49%), pejabat kurang kompeten (35%), dan ekonomi melemah (33%).



Opini Publik terhadap RUU Berjalan

Opini publik terhadap RUU yang sedang berjalan menunjukkan bahwa posisi sebagian besar masyarakat cenderung berseberangan dengan sikap partai politik di DPR. Dari beberapa RUU Prolegnas yang menjadi pertanyaan pada Q4 2025, masyarakat tetap ingin mempertahankan pemilihan kepala daerah langsung (72%), menyuarakan pengawasan jelas terhadap kewenangan aparat (72%), dan menekankan perlindungan hutan secara jangka panjang (61%).



Indeks Partai Politik

Indeks Partai Politik pada Q4 2025 ditentukan berdasarkan sikap partai politik dan opini masyarakat terhadap KUHAP baru, RUU Kehutanan, RUU Polri, RUU Penyadapan, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, dan RUU Pilkada.

Pada Q4, masih terdapat jarak antara posisi masyarakat dengan partai politik terhadap beberapa RUU. Partai Demokrat mendapatkan skor terendah dengan 20,5, sementara PDIP masih menjadi partai dengan skor tertinggi dengan 43,2.

Partai Politik	Indeks per kuartal (2025)			
	Q4	Q3	Q2	Q1
Demokrat	20,5	42,0	37,8	35,5
NasDem	23,8	28,6	37,8	61,0
PKB	30,8	39,1	37,6	61,0
PDIP	43,2	51,2	36,5	28,9
Golkar	25,0	31,2	36,5	31,1
PKS	27,8	47,6	35,5	61,1
Gerindra	25,0	47,6	31,7	46,2
PAN	20,8	41,9	27,9	35,6

Temuan (3)



Persepsi Masyarakat terhadap Bencana Banjir-longsor di Sumatera

Mayoritas masyarakat yang mengetahui bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera memperoleh informasi melalui media sosial (82%) dan televisi (57%), menunjukkan peran besar media dalam membentuk kesadaran publik.

Kementerian Kehutanan (42%) dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya bencana banjir-longsor di Sumatera, disusul dengan Kementerian Lingkungan Hidup (38%). Ditinjau berdasarkan area tempat tinggal, mereka yang berada di perkotaan secara signifikan menanggapi bahwa Presiden dan Wakil Presiden (42%) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam bencana banjir-longsor ini.

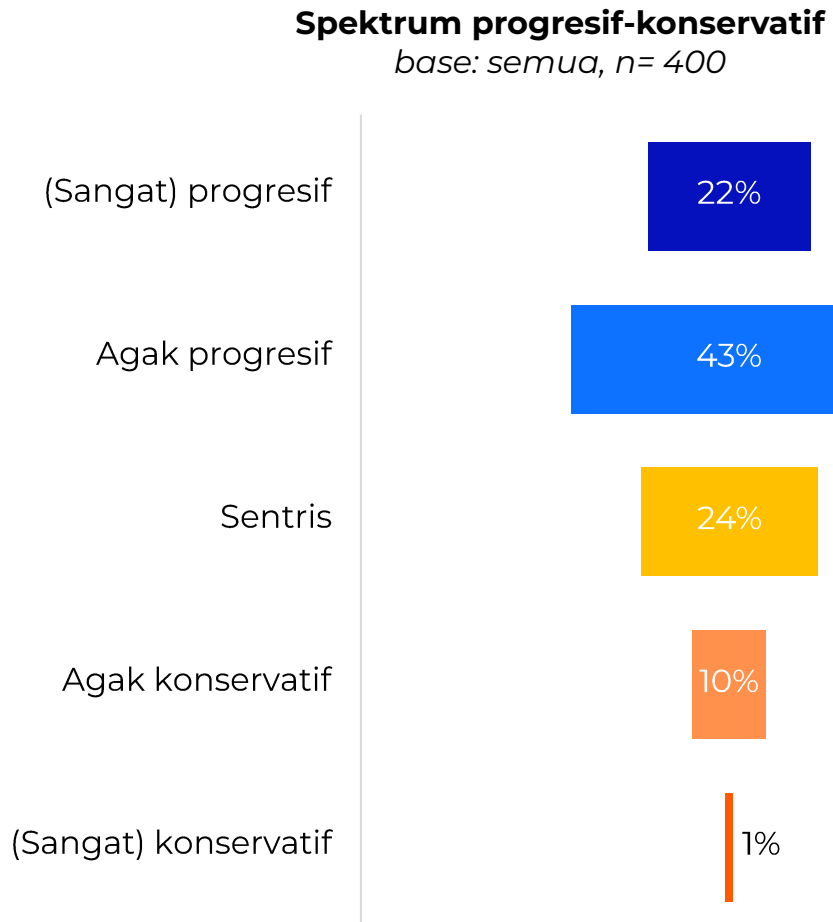
Dari sisi prioritas penanganan, masyarakat menilai pemulihan pemukiman warga terdampak (45%) sebagai isu paling mendesak, disusul dengan perlunya penindakan tegas terhadap pelaku kerusakan lingkungan (48%). Secara umum, mayoritas masyarakat sepakat bahwa penanganan banjir perlu berfokus pada upaya pencegahan (70%), mitigasi risiko (73%), serta percepatan bantuan pasca bencana (67%).



Sumber: Storyset

1 Segmentasi

Spektrum Progresif-Konservatif



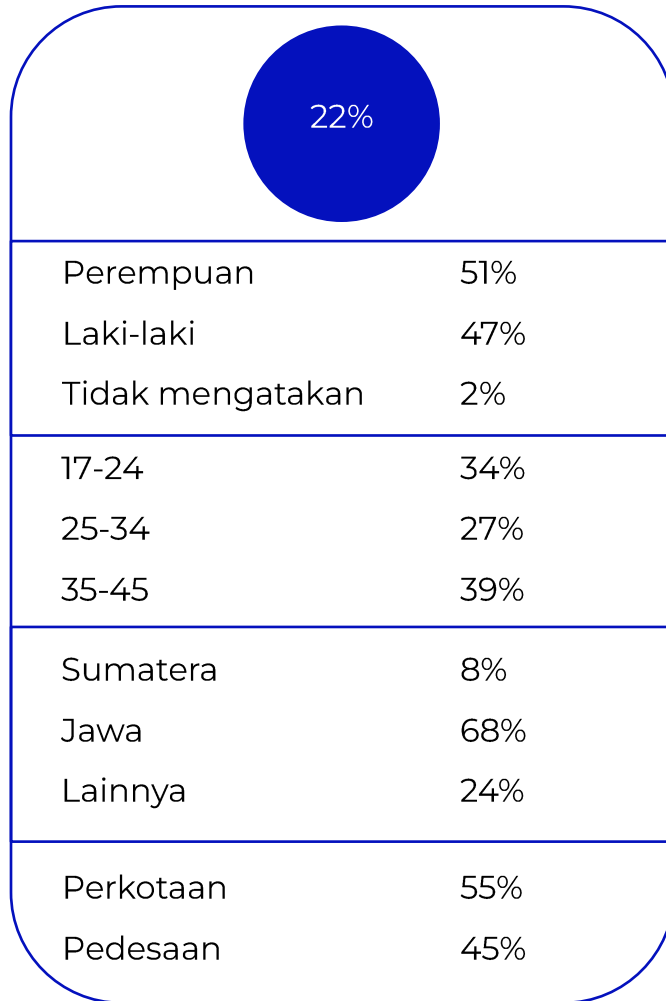
Pengujian skala progresif-konservatif mengidentifikasi lima kelompok utama, yaitu: (1) sangat progresif, (2) progresif, (3) sentris, (4) konservatif, dan (5) sangat konservatif. Skala ini dibuat berdasarkan posisi masyarakat dalam RUU/UU berjalan, seperti (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (2) RUU Kehutanan, (3) RUU Polri, (4) RUU Pengelolaan perubahan Iklim, (5) RUU Penjadapan, dan (6) RUU Pilkada

Hasil NKS Q4 2025 menemukan bahwa semakin progresif masyarakat, semakin buruk penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah. Sebaliknya, semakin konservatif mereka, semakin bagus penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah.

Spektrum ini dibuat untuk membantu memahami posisi masyarakat saat ini dalam penilaian terhadap program dan kebijakan pemerintah. Dengan melihat pemetaan progresif-konservatif, kita dapat memahami bagaimana penilaian masyarakat terhadap pemerintah dalam beberapa topik dan isu-isu prioritas.

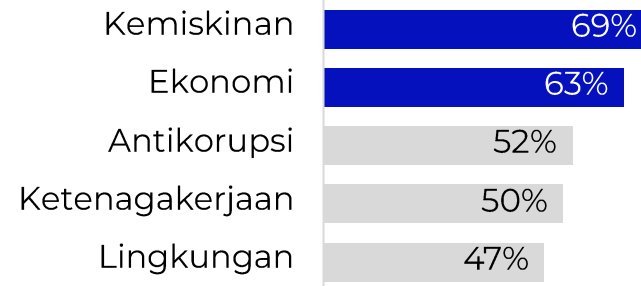
(Sangat) progresif

Demografi & profil (sangat) progresif



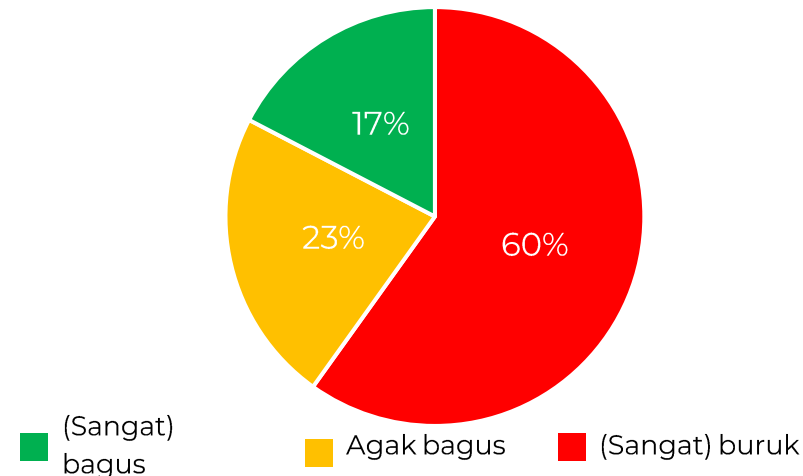
Topik prioritas

base: (sangat) progresif, n= 87



Kinerja Lingkungan

base: (sangat) progresif, n= 87



Isu prioritas

base: (sangat) progresif, n= 87

Isu yang perlu segera diselesaikan	
Tingkat pengangguran tinggi	66%
APBN tidak transparan dan korupsi	59%
Inefisiensi penanganan bencana	58%
MBG tidak transparan	55%
Mahalnya bahan pokok	54%

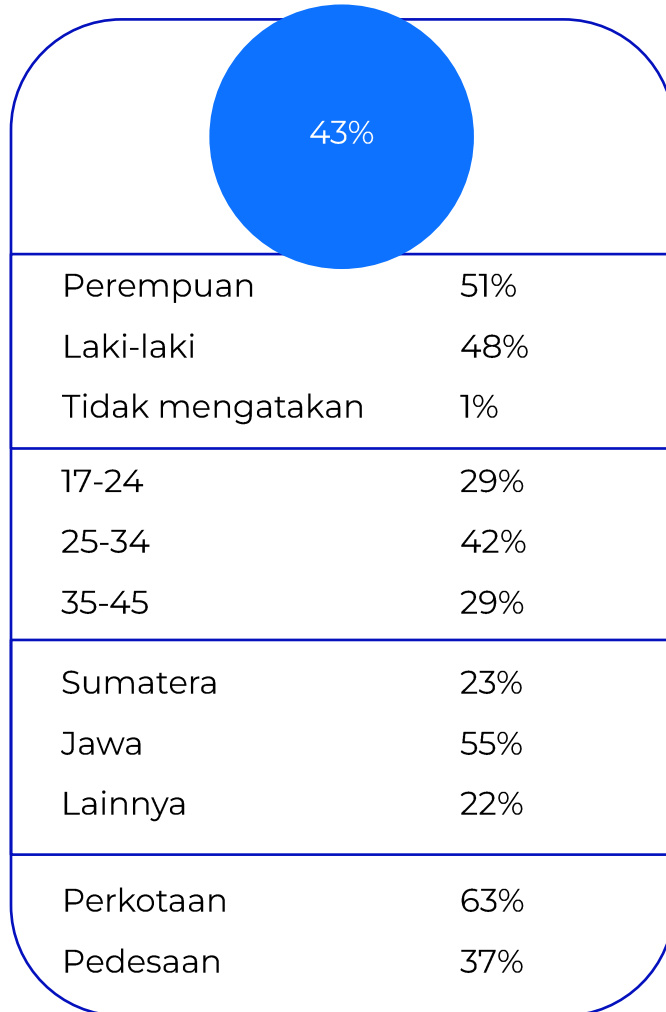
Isu lingkungan prioritas

base: (sangat) progresif, n= 87

Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan	
Pembukaan hutan untuk sawit	49%
Deforestasi & alih fungsi hutan	43%
Proyek tambang yang merusak	43%
Perampasan hutan adat utk PSN	33%
Pencemaran dari limbah industri	31%

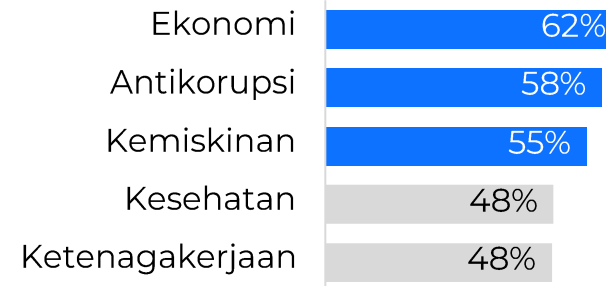
Agak Progresif

Demografi & profil agak progresif



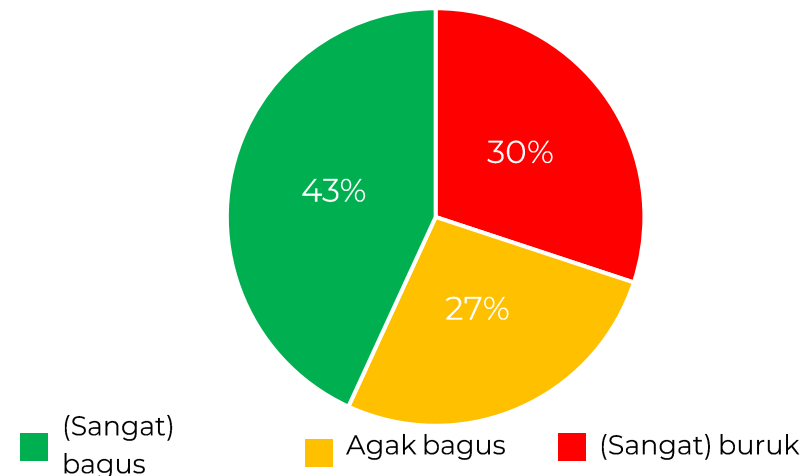
Topik prioritas

base: agak progresif, n= 170



Kinerja Lingkungan

base: agak progresif, n= 170



Isu prioritas

base: agak progresif, n= 170

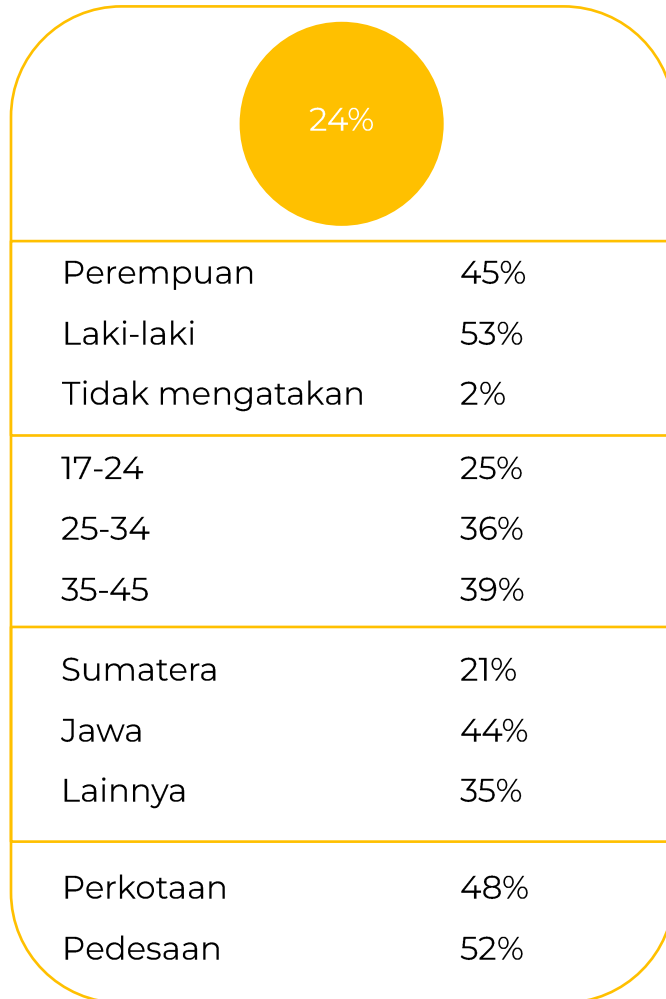
Isu yang perlu segera diselesaikan	
APBN tidak transparan dan korupsi	58%
Tingkat pengangguran tinggi	57%
Inefisiensi penanganan bencana	53%
MBG tidak transparan & keracunan	49%
Mahalnya harga bahan pokok	46%

Isu lingkungan prioritas

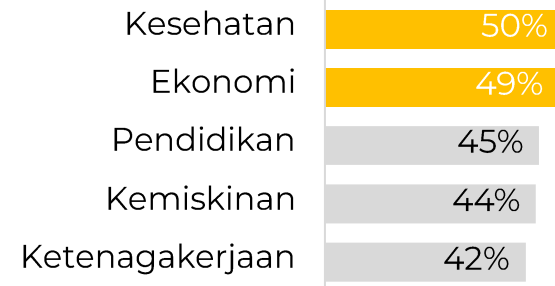
base: agak progresif, n= 170

Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan	
Proyek tambang yang merusak	47%
Pembukaan hutan untuk sawit	42%
Pengelolaan sampah tidak efisien	32%
Banjir dan air rob	31%
Pencemaran dari limbah industri	29%

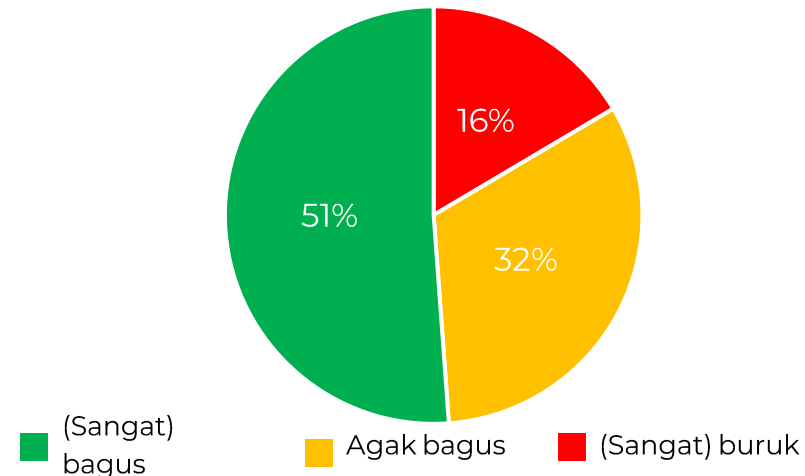
Demografi & profil sentris



Topik prioritas base: sentris, n= 97



Kinerja Lingkungan base: sentris, n= 97



Isu prioritas base: sentris, n= 97

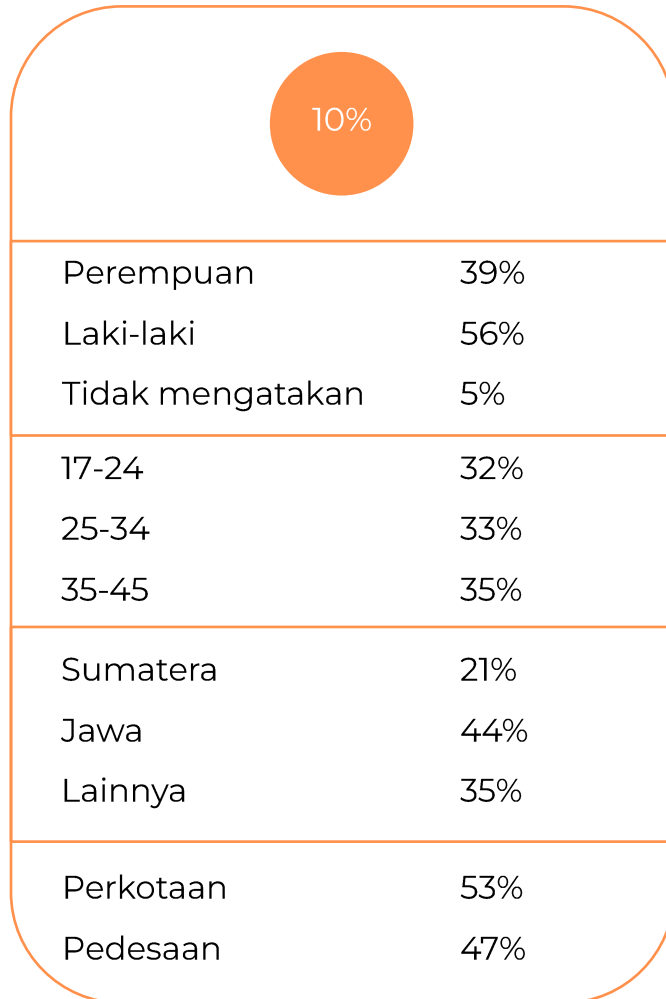
Isu yang perlu segera diselesaikan	
MBG tidak transparan & keracunan	43%
Tingkat pengangguran tinggi	43%
APBN tidak transparan & korupsi	43%
Mahalnya harga bahan pokok	40%
Inefisiensi penanganan bencana	37%

Isu lingkungan prioritas base: sentris, n= 97

Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan	
Pembukaan hutan untuk sawit	33%
Pencemaran dari limbah industri	32%
Banjir dan air rob	32%
Kebakaran hutan & lahan	30%
Perampasan hutan adat utk PSN	29%

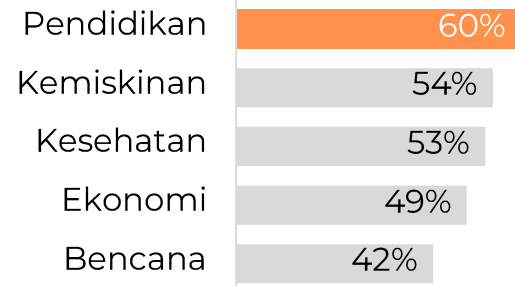
Agak Konservatif

Demografi & profil agak konservatif



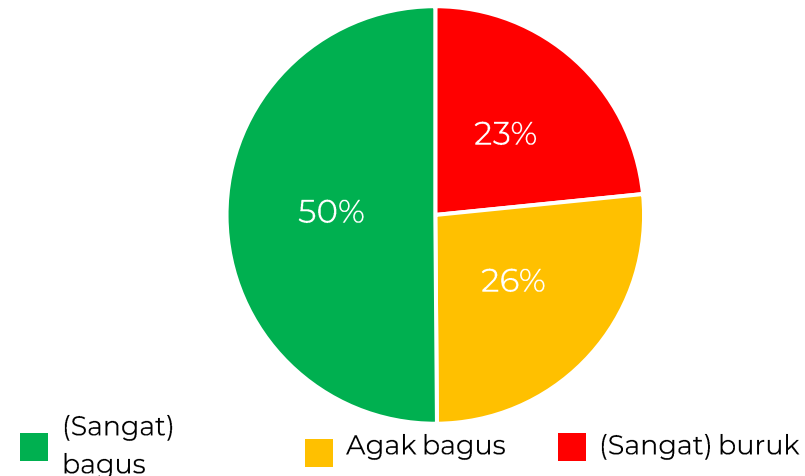
Topik prioritas

base: agak konservatif, n= 40



Kinerja Lingkungan

base: agak konservatif, n= 40



Isu prioritas

base: agak konservatif, n= 40

Isu yang perlu segera diselesaikan	
APBN tidak transparan dan korupsi	59%
Mahalnya harga bahan pokok	52%
Kebebasan berpendapat terancam	41%
Inefisiensi penanganan bencana	38%
MBG tidak transparan & keracunan	37%

Isu lingkungan prioritas

base: agak konservatif, n= 40

Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan	
Cuaca ekstrem	39%
Banjir dan air rob	36%
Proyek tambang yang merusak	32%
Deforestasi & alih fungsi hutan	28%
Populasi gajah menurun	26%

(Sangat) konservatif

Demografi & profil konservatif

1%	
Perempuan	21%
Laki-laki	79%
Tidak mengatakan	0%
17-24	42%
25-34	37%
35-45	21%
Sumatera	0%
Jawa	21%
Lainnya	79%
Perkotaan	58%
Pedesaan	42%

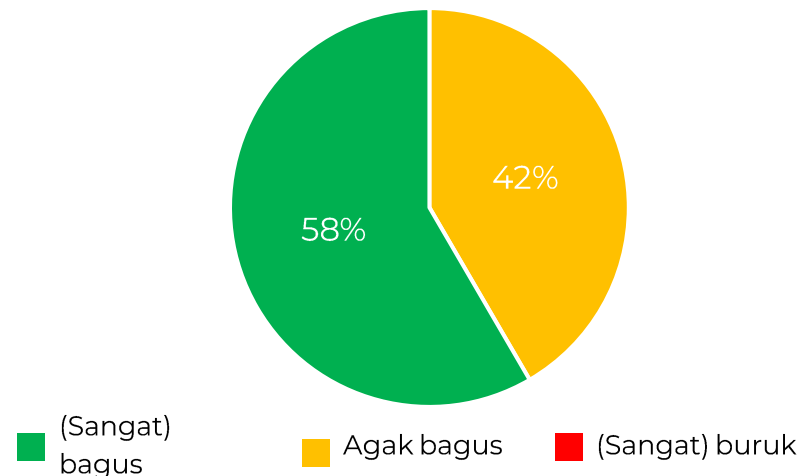
Topik prioritas

base: (sangat) konservatif, n= 6

Ekonomi	60%
Bencana	58%
Ketenagakerjaan	42%
Kesetaraan gender	42%
Hak Asasi Manusia	40%

Kinerja Lingkungan

base: (sangat) konservatif, n= 6



Isu prioritas

base: (sangat) konservatif, n= 6

Isu yang perlu segera diselesaikan	
UU wewenang aparat yang kuat	62%
Intervensi negara di ranah privat	60%
Maraknya kekerasan oleh aparat	42%
Inefisiensi penanganan bencana	40%
Kebebasan berpendapat terancam	21%

Isu lingkungan prioritas

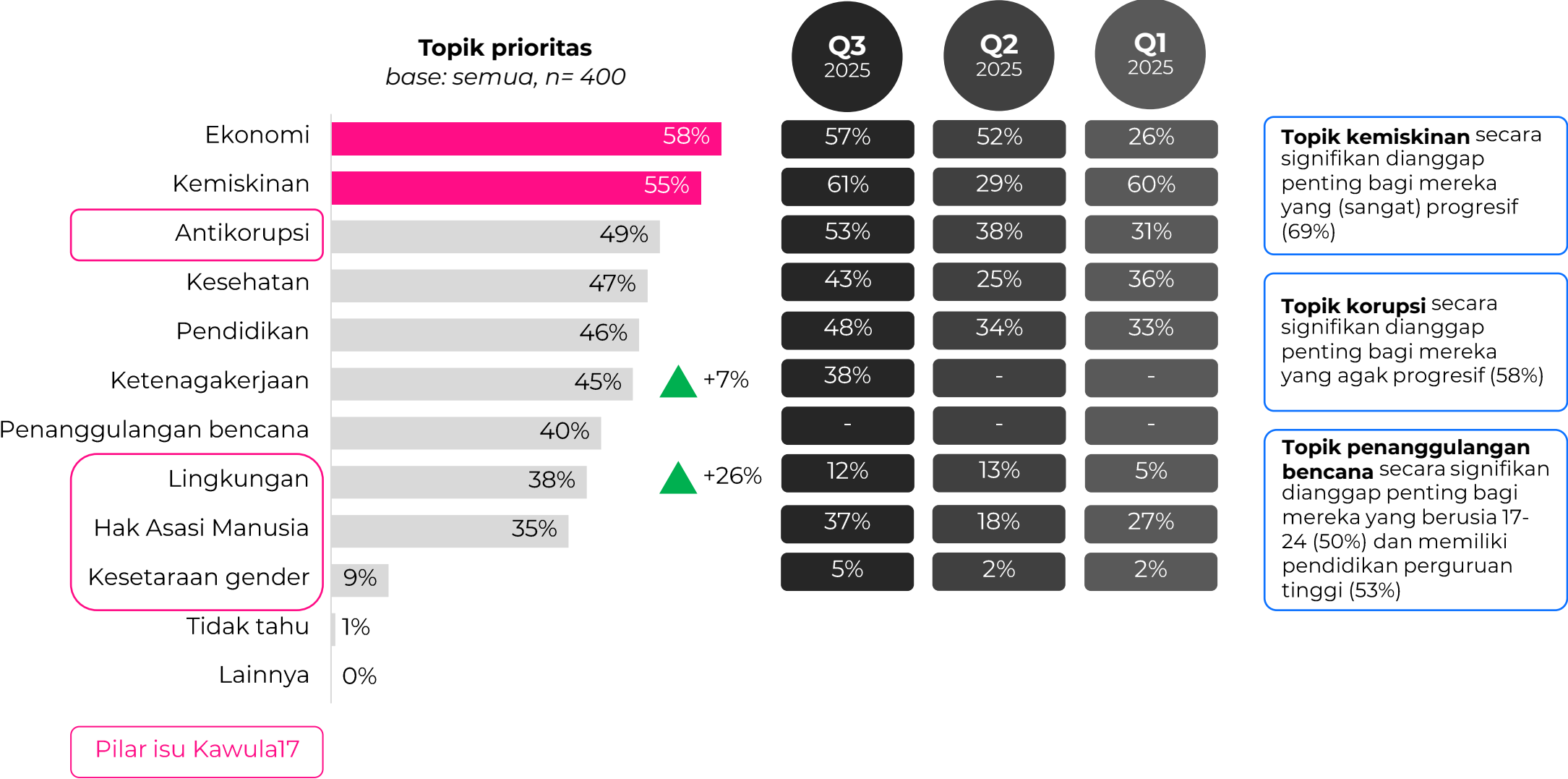
base: (sangat) konservatif, n= 6

Isu lingkungan yang perlu segera diselesaikan	
Pengelolaan sampah tidak efisien	60%
Pencemaran dari limbah industri	42%
Deforestasi & alih fungsi hutan	40%
Kebakaran hutan & lahan	40%
Proyek tambang yang merusak	38%

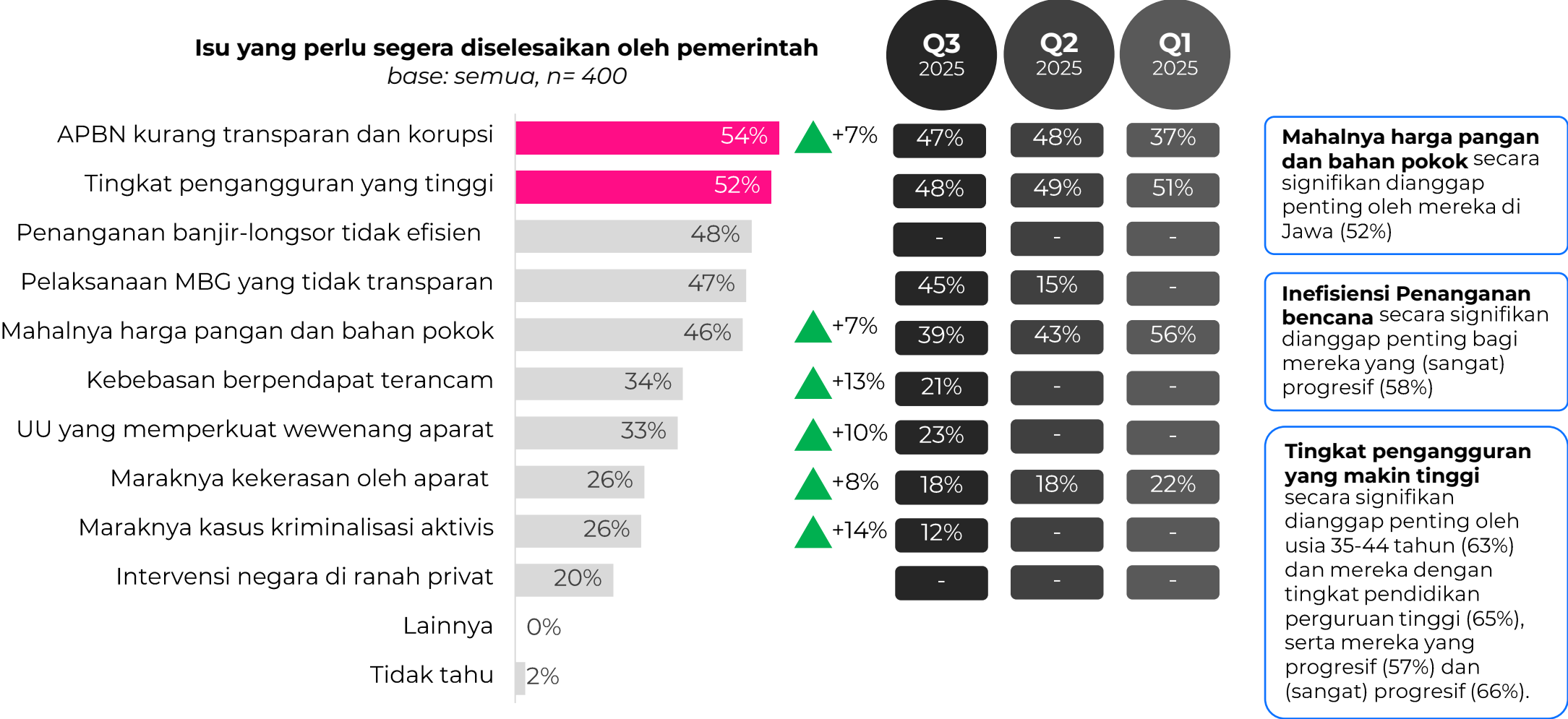


② Isu Prioritas

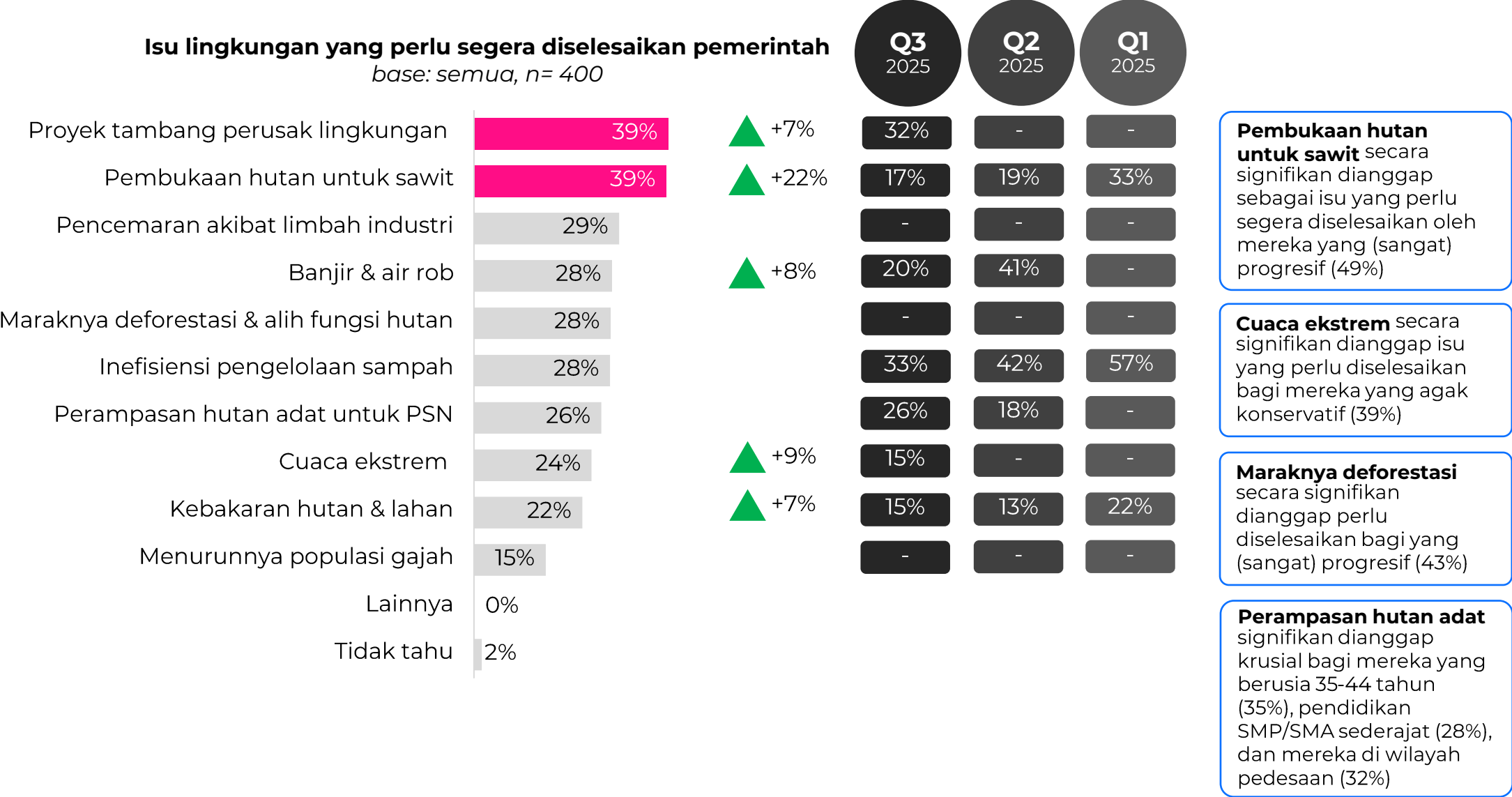
Topik ekonomi (58%) dan kemiskinan (55%) menjadi prioritas bagi masyarakat pada Q4 2025. Topik lingkungan meningkat sangat signifikan (+26%) dari Q3.



Sejalan dengan kuartal sebelumnya, APBN yang kurang transparan (54%) dan tingkat pengangguran tinggi (52%) menjadi isu prioritas masyarakat.



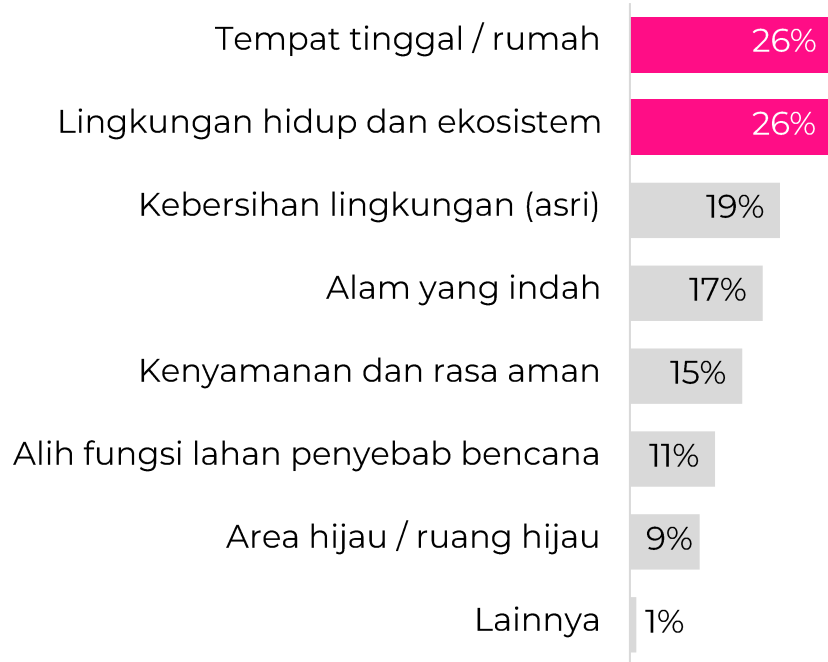
2 dari 5 orang mendesak agar proyek tambang yang merusak lingkungan dan pembukaan lahan sawit segera diselesaikan oleh pemerintah.



‘Lingkungan’ dikaitkan dengan rumah dan ekosistem (26%), sedangkan ‘bencana’ terutama dikaitkan dengan rasa takut (26%) dan banjir (24%).

Asosiasi kata "lingkungan"

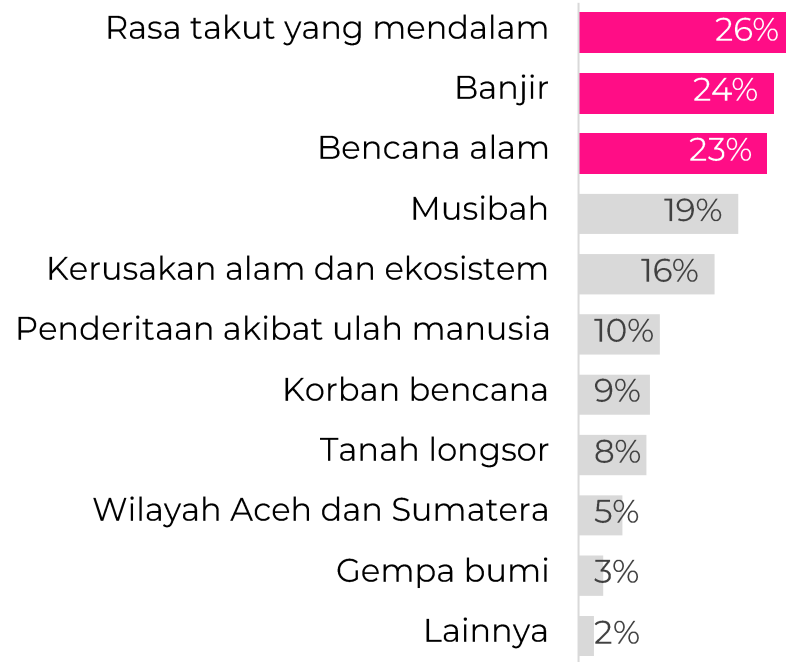
base: semua, n= 400



Kata “lingkungan” signifikan diasosiasikan sebagai **kenyamanan dan rasa aman** oleh mereka yang menilai kinerja Prabowo (sangat) bagus (23%)

Asosiasi kata "bencana"

base: semua, n= 400

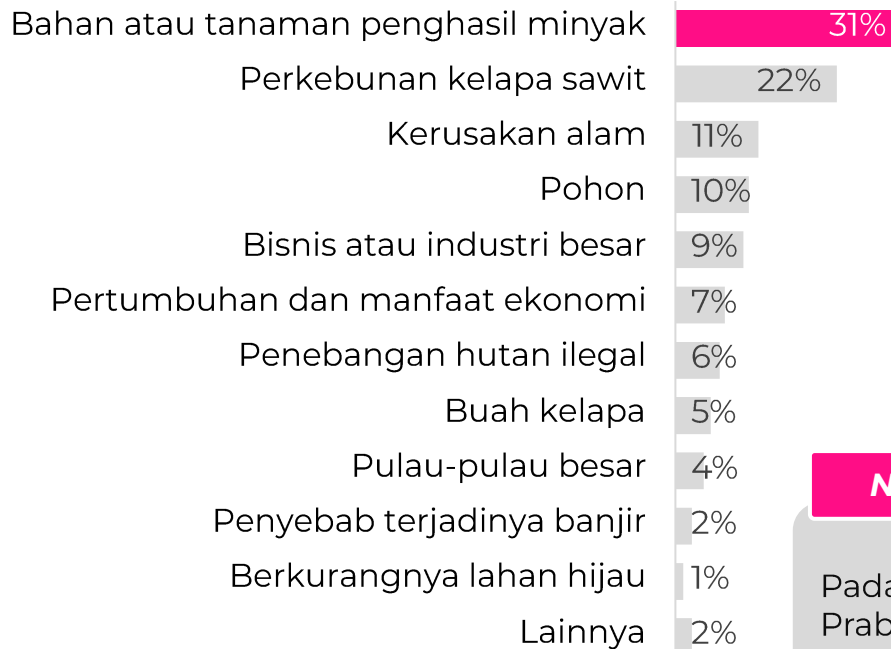


Kata “bencana” signifikan diasosiasikan sebagai **penderitaan akibat ulah manusia** oleh perempuan (13%) dan mereka yang tinggal di perkotaan (13%)

Kata 'sawit' dipahami berdasarkan fungsinya sebagai penghasil minyak (31%), sementara 'hutan' diasosiasikan dengan penggundulan hutan (30%).

Asosiasi kata "sawit"

base: semua, n= 400



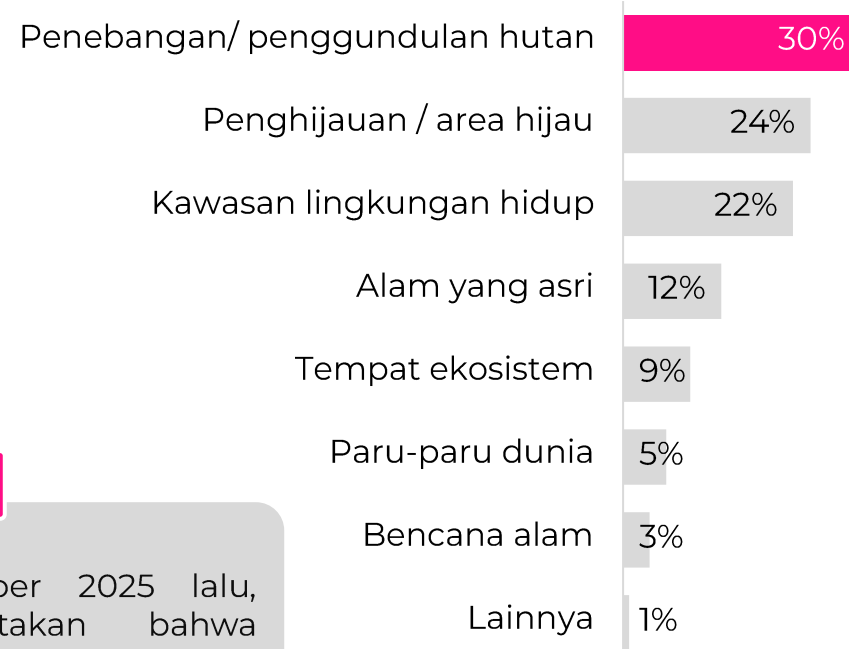
Kata "sawit" signifikan diasosiasikan dengan **bahan atau tanaman penghasil minyak** oleh mereka yang menilai kinerja Prabowo cukup (35%) dan (sangat) bagus (43%)

Nice to know

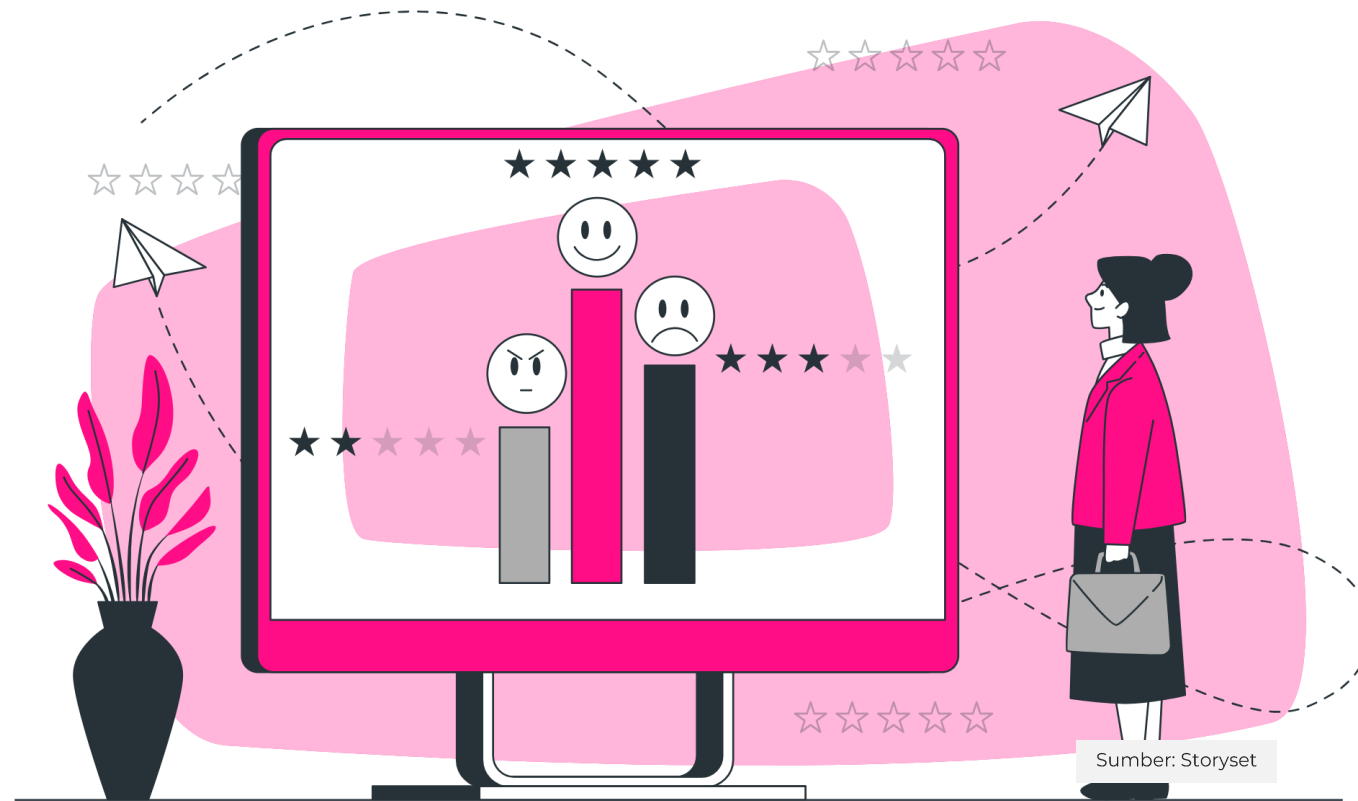
Pada 30 Desember 2025 lalu, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia perlu manambah penanaman kelapa sawit. Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa lahan sawit bukan penyebab deforestasi, karena **kelapa sawit juga merupakan pohon**.

Asosiasi kata "hutan"

base: semua, n= 400



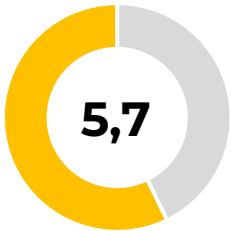
Kata "hutan" signifikan diasosiasikan dengan **penebangan atau penggundulan hutan** oleh mereka yang tinggal di Pulau Jawa (39%) dan mereka yang menilai kinerja Prabowo (sangat) buruk (41%)



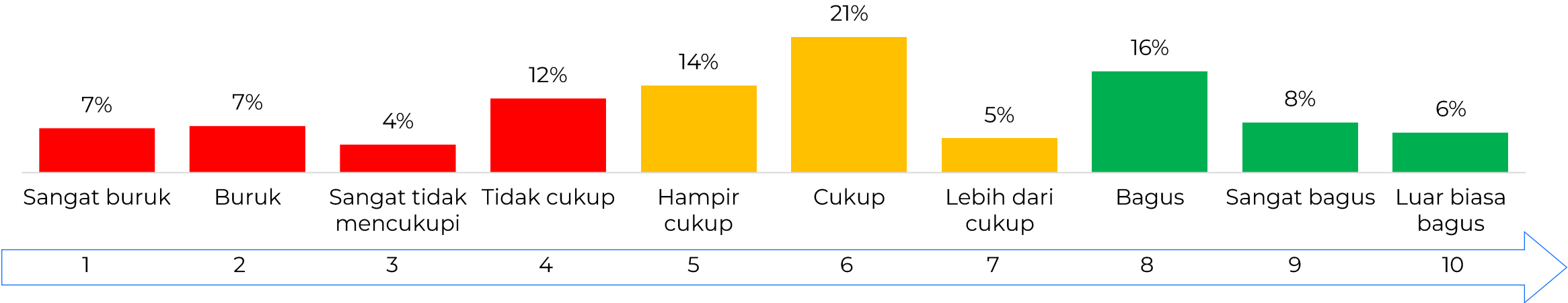
3 Penilaian Kinerja Pemerintah

Kinerja pemerintah pada Q4 2025 mendapatkan skor 5.7 dari masyarakat.

Skor Kinerja
Pemerintah Q4 2025



Kinerja Pemerintah
base: semua, n= 400



Kinerja pemerintah signifikan dinilai **sangat buruk** oleh mereka yang memiliki pendidikan perguruan tinggi (17%)

Kinerja pemerintah secara signifikan dinilai **luar biasa bagus** oleh perempuan (9%) dan SES D (24%)

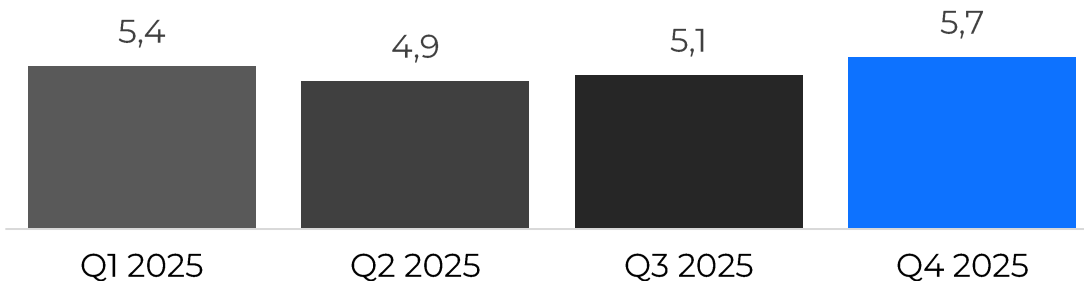
Kinerja pemerintah signifikan dinilai **sangat tidak mencukupi** oleh mereka yang (sangat) tidak yakin dengan program Prabowo (12%)

Kinerja pemerintah signifikan dinilai **cukup** oleh mereka yang agak yakin dengan program Prabowo (36%) dan (sangat) progresif (33%)

Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat pada Q4 2025 meningkat dibandingkan dengan tiga kuartal sebelumnya.



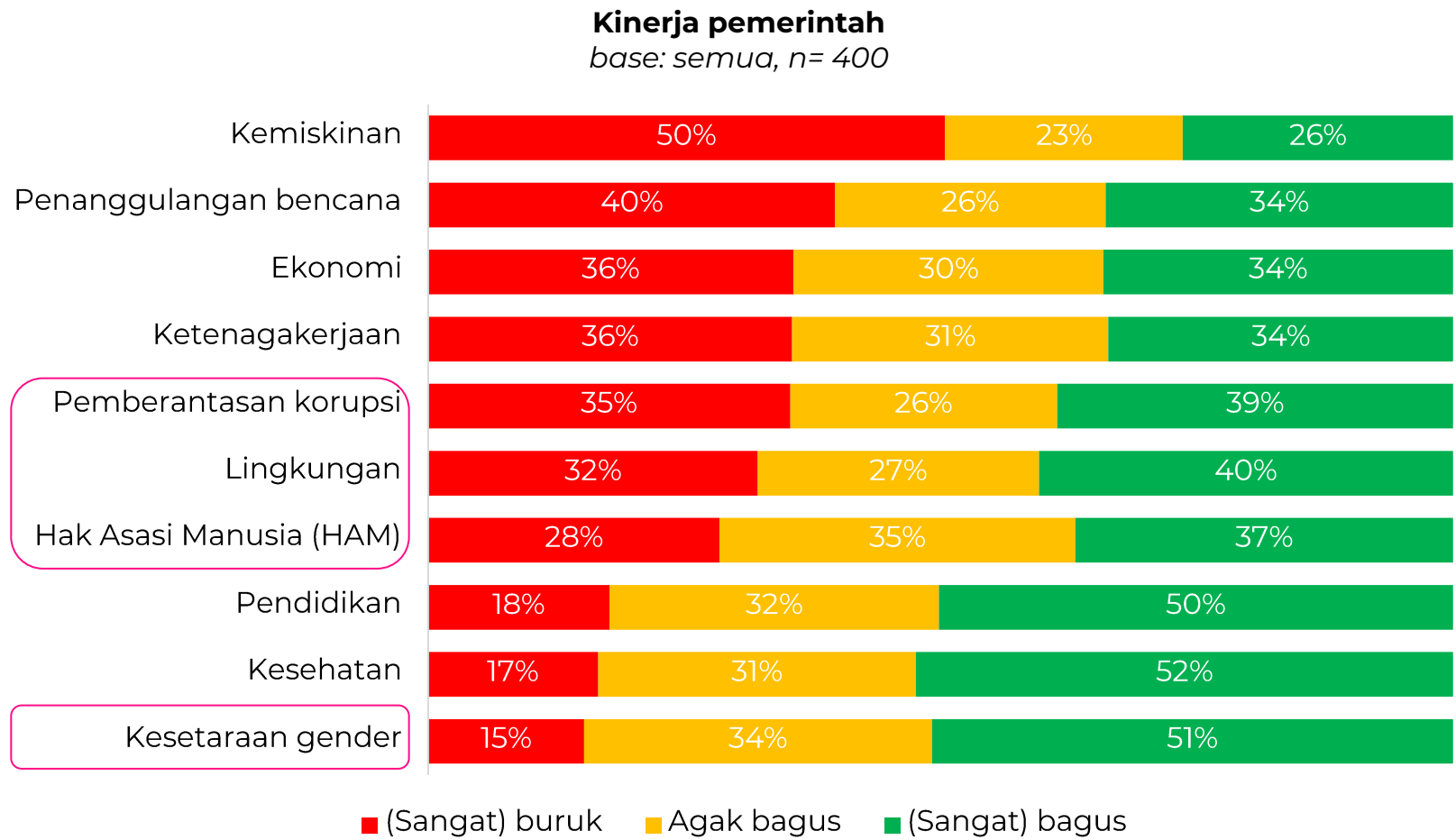
Tren Kinerja Pemerintah
base: semua, n= variasi



Pada Q4 2025, penilaian kinerja pemerintah mengalami kenaikan sangat tipis (+0,6 poin) dibandingkan dengan Q3. Sebelumnya, pada Q1, skor 5,4 mencerminkan fase awal efektivitas pemerintahan baru Prabowo-Gibran, yang kemudian menurun tajam pada Q2 yang menjadi titik terendah sepanjang 2025, bisa disebabkan oleh maraknya demonstrasi pasca pengesahan UU TNI pada Maret 2025.

Penilaian rendah berlanjut pada Q3 seiring gelombang protes pada akhir Agustus 2025. Kenaikan terbatas di Q4 sejalan dengan upaya pemerintah yang lebih aktif dalam mengomunikasikan program-programnya kepada publik, yang mulai direspons lebih positif oleh masyarakat.

Kinerja pemerintah dalam menangani kemiskinan (50%) dan penanggulangan bencana (40%) masih dianggap (sangat) buruk.



Lingkungan signifikan dianggap (sangat) buruk terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah Jawa (41%)

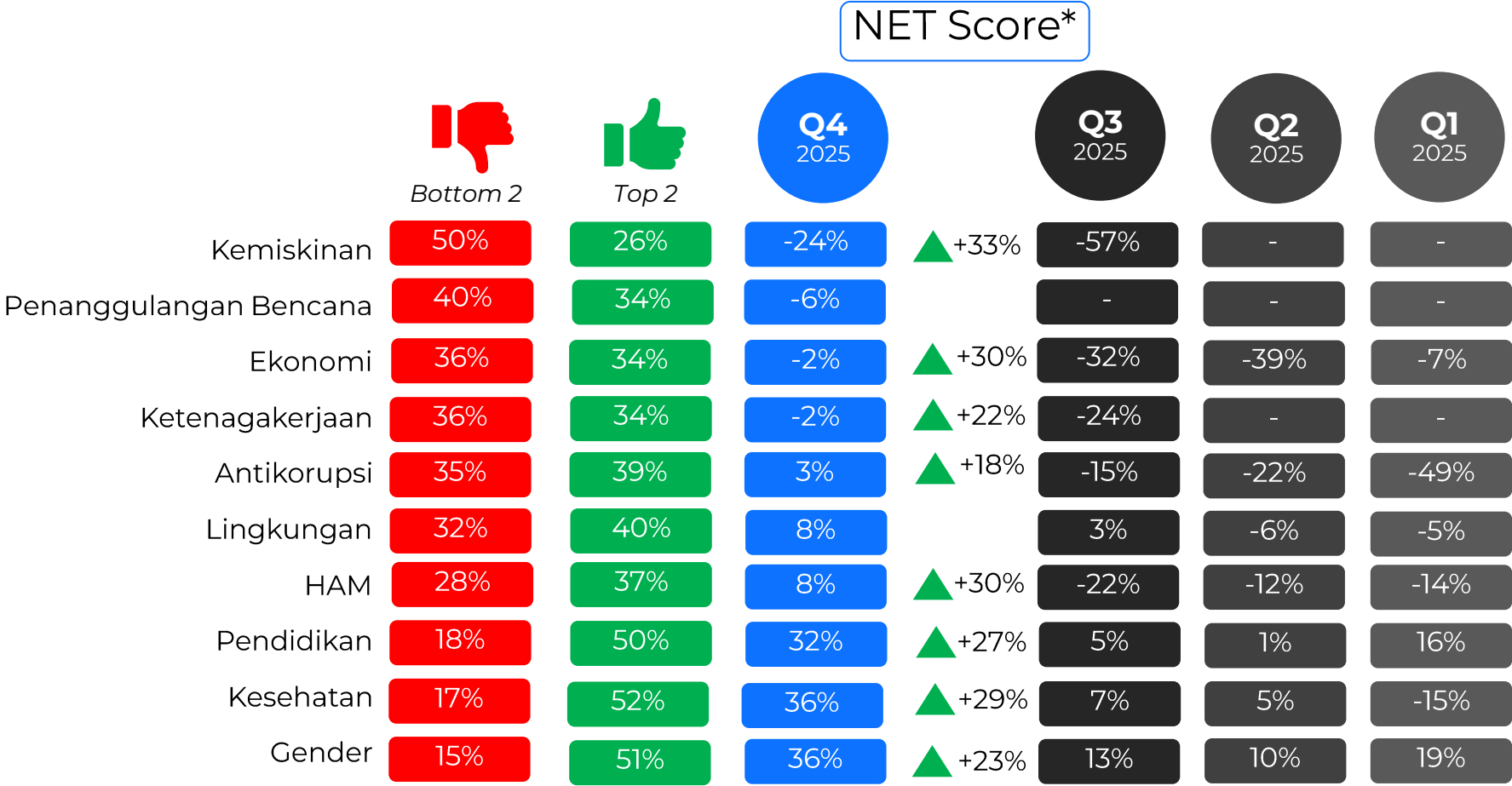
Kesetaraan gender signifikan dianggap (sangat) buruk terutama bagi mereka yang berusia 35-44 tahun (23%)

Pemberantasan korupsi signifikan dianggap (sangat) buruk terutama bagi mereka dengan pendidikan tinggi (50%) dan mereka di Jawa (44%)

Hak asasi manusia signifikan dianggap (sangat) buruk terutama bagi laki-laki (34%)

Pilar isu Kawula17

Penilaian NET Score kinerja pemerintah meningkat secara substansial, namun beberapa skor negatif perlu menjadi catatan.



NET Score

NET score digunakan untuk memberikan gambaran sederhana tentang seberapa puas/penting sebuah topik.

Skor ini diperoleh dengan mengurangi jumlah respons positif (misalnya sangat puas) dengan respons negatif (misalnya sangat tidak puas).

Cara membaca NET score: skor yang lebih tinggi dan positif menunjukkan sentimen positif yang lebih kuat, sedangkan skor negatif menunjukkan sentimen negatif yang lebih kuat.



④ Ekspektasi terhadap Pemerintah

Program *Quick Win* Pemerintah

Pemerintah menetapkan sejumlah program hasil terbaik cepat (*quick win*) di dalam dokumen visi misinya. Program-program tersebut adalah:

Makan Bergizi Gratis

Program ini merupakan inisiatif untuk menyediakan asupan gizi yang cukup dan seimbang bagi anak-anak Indonesia, khususnya di sekolah dan pesantren yang bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan preventif dan deteksi dini penyakit. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan ketika ulang tahun, serta untuk anak sekolah dan ibu hamil

Food Estate

Program *food estate* adalah pengembangan kawasan pertanian skala besar yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan tujuan utama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sekolah Unggulan Garuda

Program ini merupakan inisiatif untuk mendirikan dan mengembangkan sekolah-sekolah berkualitas tinggi di berbagai daerah, yang fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan pencetakan lulusan berdaya saing global.

Kartu Kesejahteraan Sosial

Program ini dirancang untuk menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Kartu ini akan mengintegrasikan berbagai jenis bantuan sosial pemerintah, seperti bantuan pangan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga penyalurannya lebih efisien, transparan, dan mampu menjangkau langsung keluarga prasejahtera.

Menaikkan Gaji ASN

Kebijakan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, yang diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

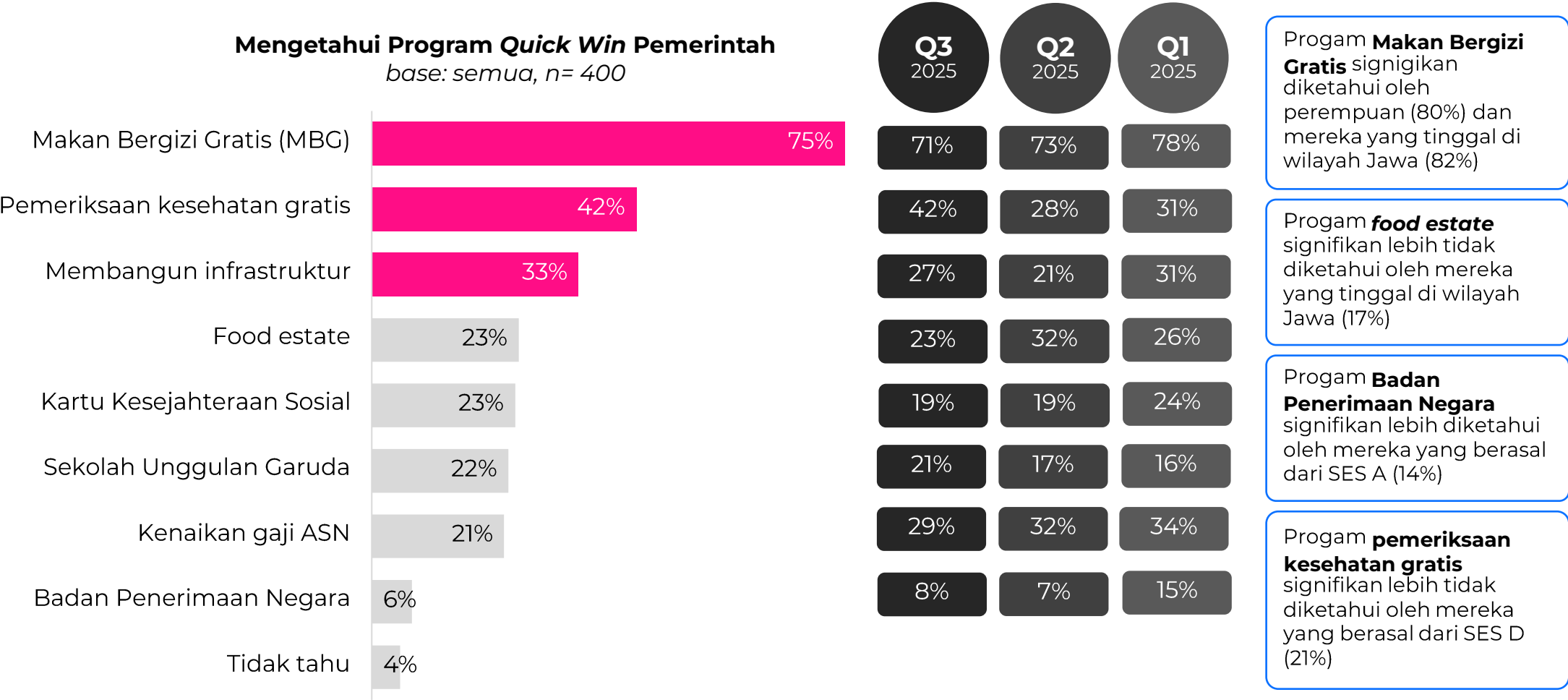
Membangun Infrastruktur

Program membangun infrastruktur akan melanjutkan dan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana dasar yang esensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, infrastruktur energi dan digital.

Badan Penerimaan Negara

Pembentukan Badan Penerimaan Negara adalah langkah restrukturisasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai sektor, termasuk pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Makan Bergizi Gratis (75%) tetap menjadi program *quick win* pemerintah yang paling diketahui masyarakat sepanjang tahun 2025.

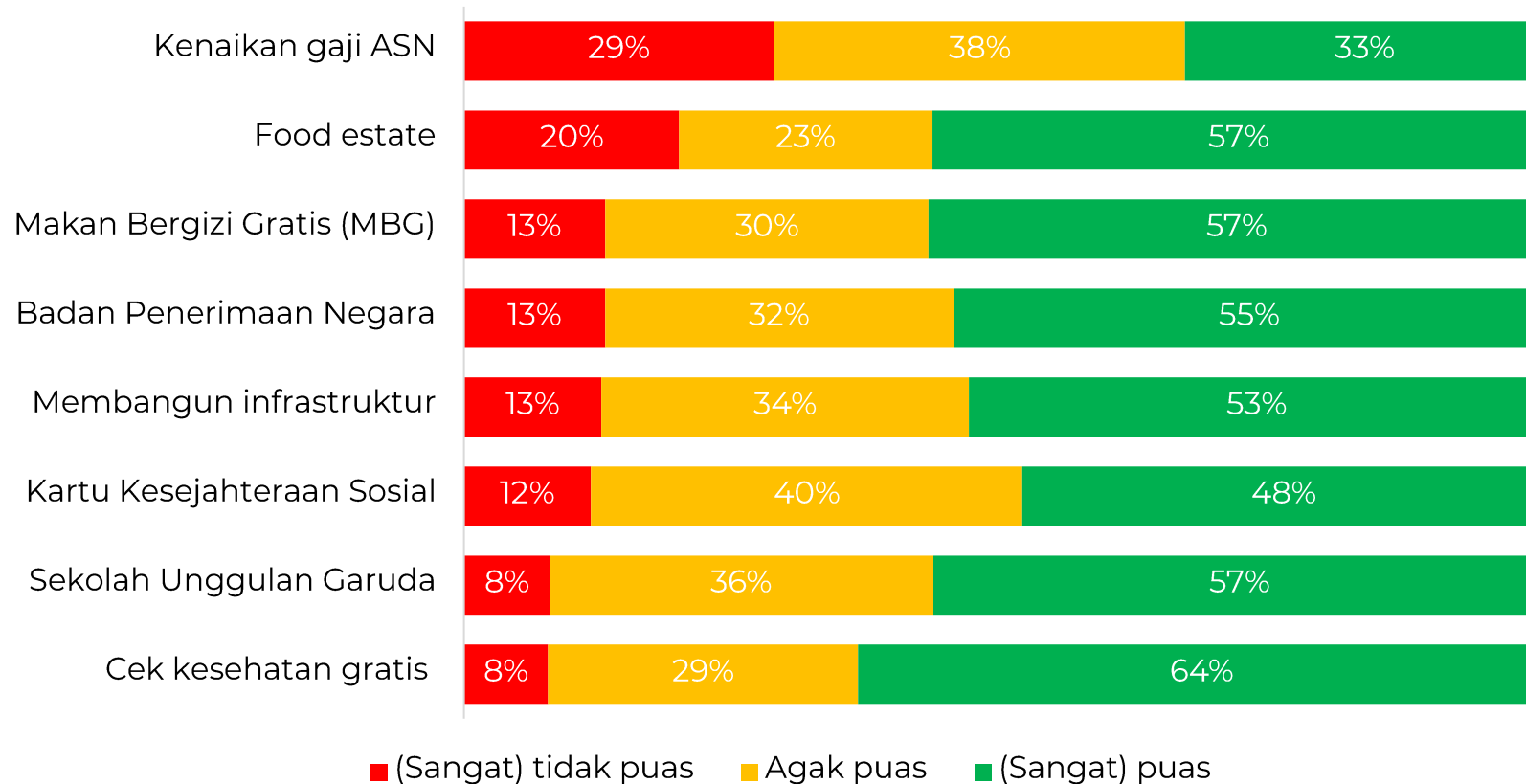


Pada Q4 2025, masyarakat tampak (sangat) puas dengan kinerja pemerintah dalam menjalankan mayoritas program *quick win*-nya.



Kepuasan Program Quick Win Pemerintah

base: semua, n= 400



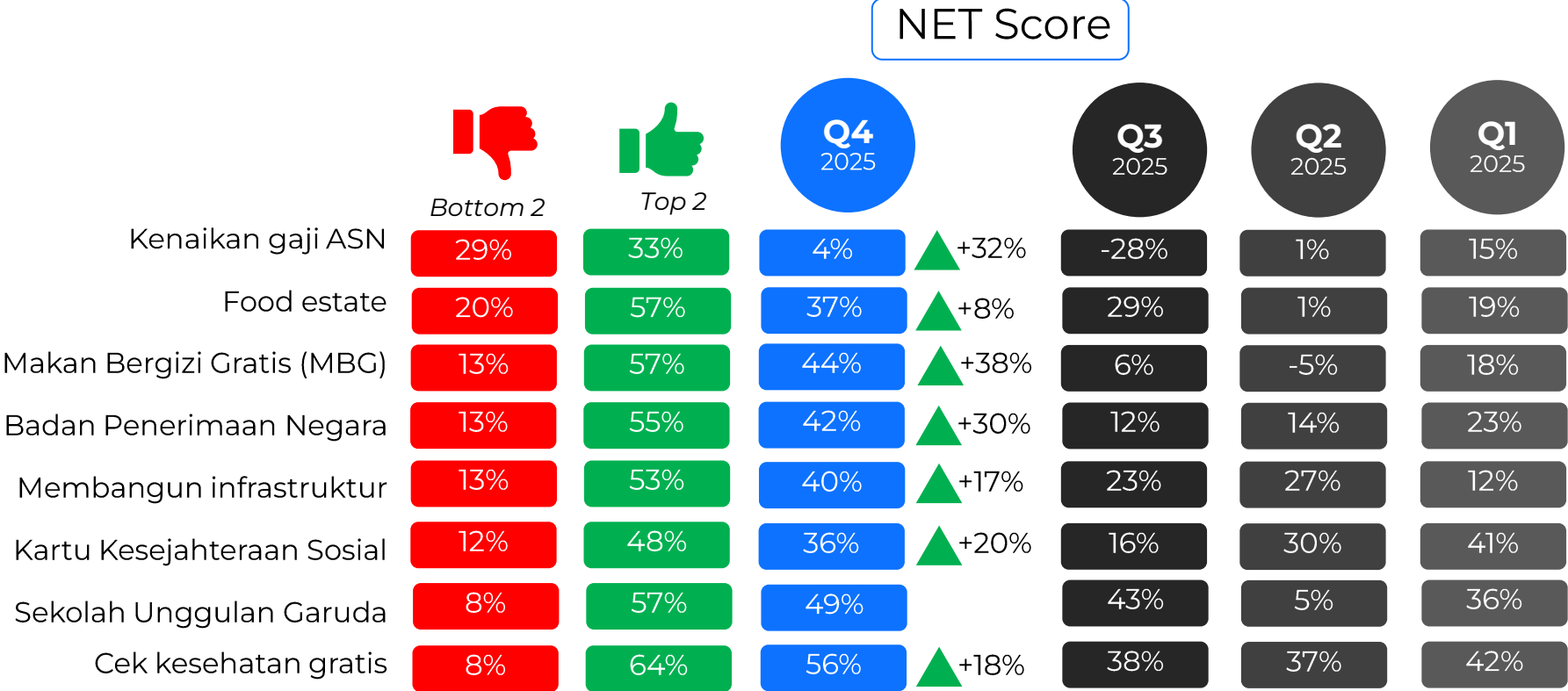
Program **kenaikan gaji ASN** signifikan dinilai sangat puas oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan perguruan tinggi (43%)

Program **Makan Bergizi Gratis** dinilai signifikan (sangat) tidak puas oleh mereka yang berusia 35-44 tahun (24%)

Mereka yang berasal dari SES B (17%) secara signifikan tidak merasa (sangat puas) atas program **kenaikan gaji ASN**.

Program **food estate** signifikan dinilai (sangat) puas oleh mereka yang berasal dari wilayah Sumatera (79%) dan memiliki tingkat pendidikan perguruan tinggi (93%)

Tren NET Score dalam program *quick win* mengalami peningkatan dari Q3, meski NET score kenaikan gaji ASN masih tampak rendah.



NET Score

NET score digunakan untuk memberikan gambaran sederhana tentang seberapa puas/penting sebuah topik.

Skor ini diperoleh dengan **mengurangi jumlah respons positif (misalnya sangat puas) dengan respons negatif (misalnya sangat tidak puas).**

Cara membaca NET score: skor yang lebih tinggi dan positif menunjukkan sentimen positif yang lebih kuat, sedangkan skor negatif menunjukkan sentimen negatif yang lebih kuat.

Program Terkini Pemerintah (1)

Berikut beberapa program dan kebijakan pemerintah selama kuartal terakhir di 2025 yang terekam dalam National Kawula17 Survey Q4 2025:

Pembelajaran digital

Program ini menyediakan *interactive flat panel*, laptop, materi digital, dan pelatihan guru untuk sekolah di 38 provinsi sebagai bagian dari transformasi digital pendidikan nasional dengan target pemerataan akses pembelajaran berbasis teknologi.

Pembangunan hunian korban banjir

Pemerintah, melalui BNPB dan Kemensos, menyiapkan hunian sementara (huntara) dan sedang mengkaji lokasi untuk pembangunan hunian tetap (hunatap) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Perluasan perkebunan sawit di Papua

Penanaman kelapa sawit di Papua didorong untuk mempercepat swasembada energi daerah saat pengarahannya kepada kepala daerah seluruh daerah Papua.

Ketahanan energi baru terbarukan

Ketahanan energi menjadi agenda prioritas pada 2026. Pemerintah juga memberikan dukungan fiskal yang diarahkan untuk peningkatan lifting migas, stabilisasi harga, dan pengembangan sektor energi baru dan terbarukan.

Pemberhentian kasus korupsi nikel

Perkara dugaan korupsi izin tambang nikel di Konawe Utara yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman dihentikan karena tidak bisa dilakukan penghitungan kerugian negara. KPK sebelumnya menetapkan sebagai tersangka pada 2017, terhadap dua tindak pidana korupsi sekaligus.

Pembukaan sawit di Tesso Nilo

Ekspansi kebun kelapa sawit yang masuk ke kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Riau, yang mengancam habitat satwa langka seperti gajah dan harimau Sumatera serta merusak fungsi kawasan konservasi.

Membangun Infrastruktur

Program membangun infrastruktur akan melanjutkan dan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana dasar yang esensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta infrastruktur energi dan digital.

Penciptaan 19 juta lapangan kerja

Pemerintah menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja dalam 5 tahun untuk menjaga angka pengangguran agar tidak bertambah seiring dengan pertumbuhan rata-rata angkatan kerja baru.

Program Terkini Pemerintah (2)

Efisiensi anggaran

Anggaran berbagai Kementerian/lembaga dilakukan untuk menekan pengeluaran dan memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor-sektor strategis. Namun, banyak sektor yang terganggu akibat efisiensi ini.

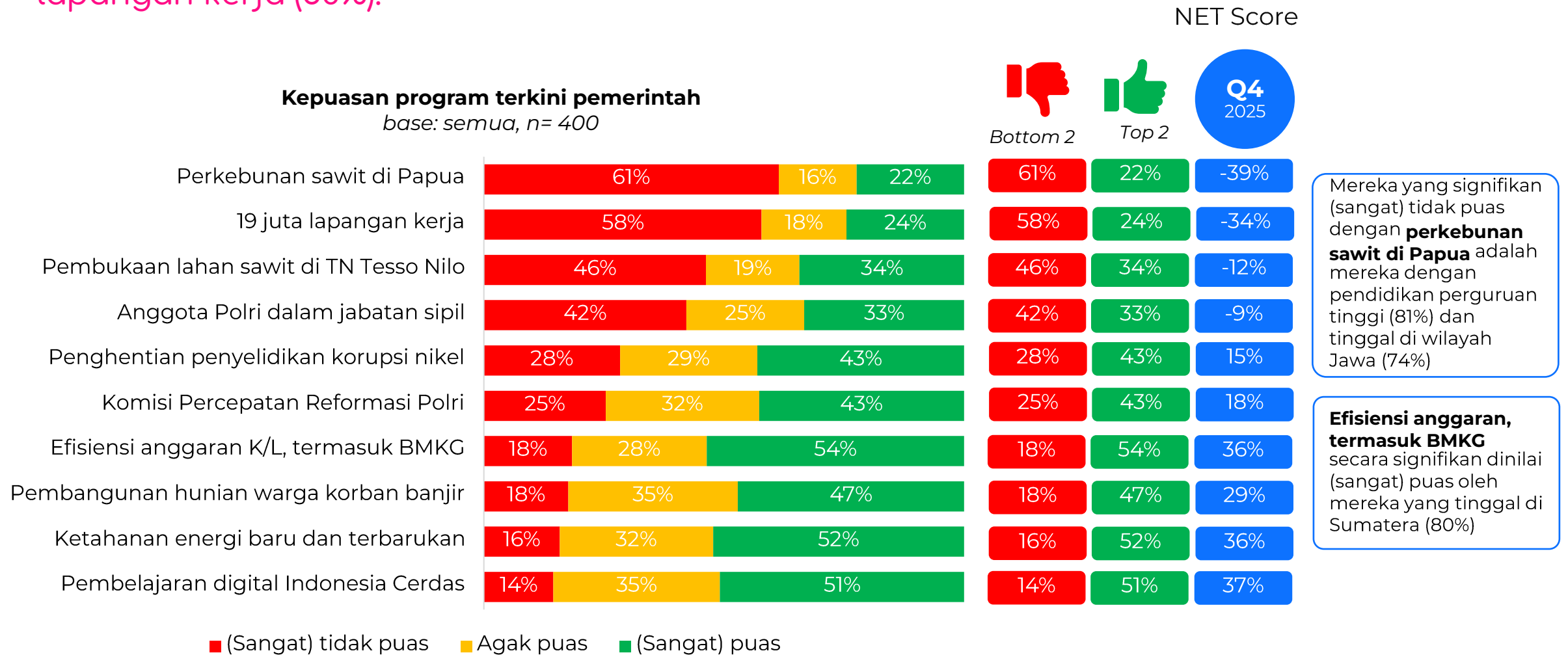
Anggota kepolisian pada jabatan ASN

Kebijakan penempatan anggota kepolisian pada jabatan ASN memungkinkan anggota Polri aktif mengisi jabatan tertentu di luar institusi kepolisian tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri terlebih dahulu. Dasar kebijakan ini terdapat dalam UU ASN dan UU Kepolisian, yang membuka ruang penugasan Polri di lembaga atau instansi sipil tertentu.

Komisi percepatan reformasi Polri

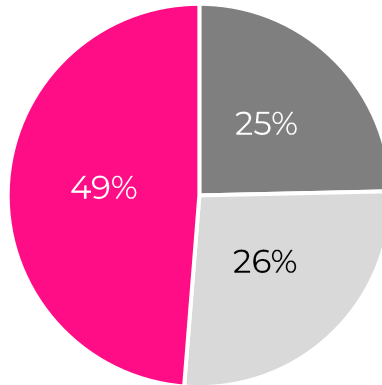
Komisi ini bertugas mempercepat proses reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme, dan memperbaiki tata kelola di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya komisi ini, pemerintah ingin memastikan Polri menjadi institusi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.

Sebagian besar masyarakat merasa (sangat) tidak puas dengan rencana pemerintah untuk memperluas perkebunan sawit di Papua (61%) dan 19 juta lapangan kerja (58%).



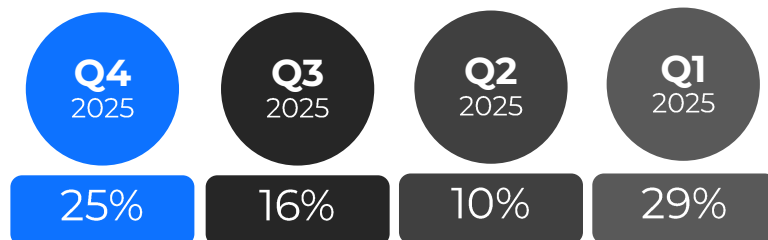
NET score keyakinan masyarakat terhadap pemenuhan program pemerintah pada Q4 (25%) menurun (-4%) jika dibandingkan awal tahun 2025 (29%).

Keyakinan terhadap pemerintah base: semua, n= 400



■ (Sangat) tidak yakin ■ Agak yakin ■ (Sangat) yakin

NET Score



Mereka yang **sangat tidak yakin** pemerintah dapat memenuhi janjinya signifikan berasal dari tingkat pendidikan perguruan tinggi (19%)

Mereka yang **yakin** pemerintah dapat memenuhi janjinya secara signifikan berasal dari wilayah Sumatera (47%) dan berusia 25-36 tahun (42%)

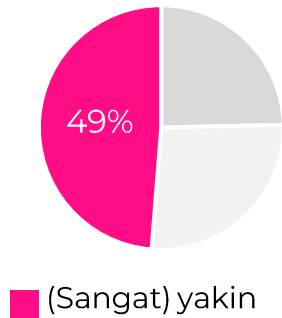
Mereka yang **sangat yakin** pemerintah dapat memenuhi janjinya secara signifikan berasal dari SES D (37%)

NET Score

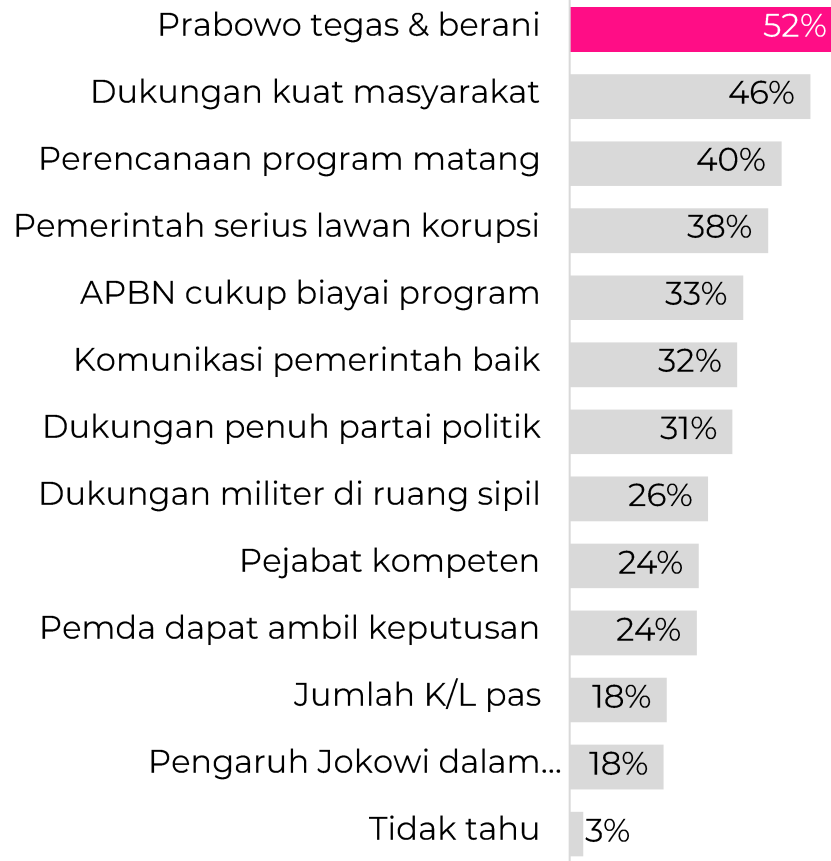
NET score digunakan untuk memberikan gambaran sederhana tentang seberapa puas/penting sebuah topik. Skor ini diperoleh dengan **mengurangi jumlah respons positif (misalnya sangat yakin) dengan respons negatif (misalnya sangat tidak yakin)**.

Cara membaca NET score: skor yang lebih tinggi dan positif menunjukkan sentimen positif yang lebih kuat, sedangkan skor negatif menunjukkan sentimen negatif yang lebih kuat.

Masyarakat yang merasa yakin atas pemenuhan program pemerintah utamanya karena karakter Prabowo yang tegas dan berani (52%).



Alasan yakin pemerintah memenuhi janji base: yakin terhadap pemerintah, n= 195



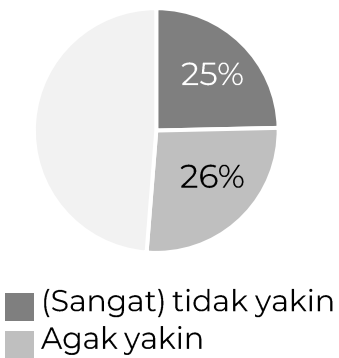
	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025
Prabowo tegas & berani	59%	27%	44%
Dukungan kuat masyarakat	52%	20%	44%
Perencanaan program matang	32%	-	-
Pemerintah serius lawan korupsi	49%	34%	29%
APBN cukup biayai program	21%	22%	24%
Komunikasi pemerintah baik	25%	16%	-
Dukungan penuh partai politik	21%	14%	26%
Dukungan militer di ruang sipil	17%	21%	18%
Pejabat kompeten	24%	11%	22%
Pemda dapat ambil keputusan	17%	20%	30%
Jumlah K/L pas	9%	7%	-
Pengaruh Jokowi dalam...	11%	8%	-

Besarnya dukungan partai politik sebagai faktor yakin secara signifikan dipilih oleh mereka yang berasal dari tingkat pendidikan perguruan tinggi (54%)

Karakter Prabowo sebagai faktor yakin signifikan dipilih oleh mereka yang berasal dari wilayah Jawa (61%)

Alasan yakin dengan pemerintah dalam memenuhi janjinya karena alasan **pengaruh Jokowi** signifikan dipilih oleh mereka yang berasal dari perkotaan (26%)

Sementara, masyarakat yang tidak yakin sebagian besar didasari oleh maraknya korupsi yang dilakukan pejabat (49%).



Alasan tidak yakin pemerintah memenuhi janji
base: agak dan tidak yakin, n= 205

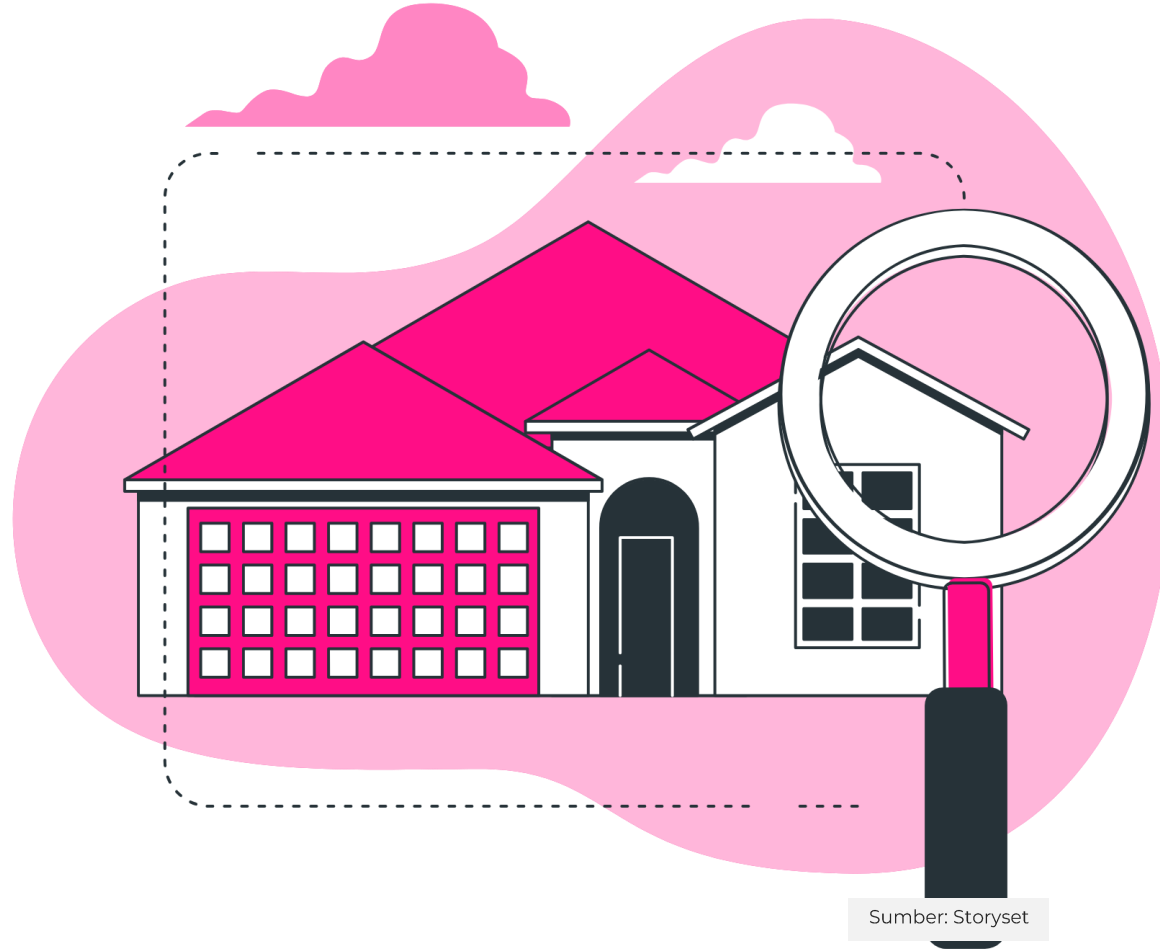
Maraknya korupsi oleh pejabat	49%
Pejabat kurang kompeten	35%
Ekonomi melemah	33%
Maraknya nepotisme	31%
Kebijakan yang elitis	31%
Konflik kepentingan antarpartai	27%
Kebebasan berpendapat dibatasi	27%
Perencanaan program lemah	23%
APBN kurang untuk program	23%
Pengaruh Jokowi masih kuat	22%
Komunikasi pemerintah buruk	20%
Keterlibatan militer	18%
Terlalu banyak K/L	18%
Kendali pusat terlalu dominan	15%
Dukungan masyarakat kurang	12%
Tidak tahu	2%

Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025
55%	52%	45%
35%	30%	-
37%	-	-
30%	-	-
33%	-	-
27%	23%	29%
19%	19%	25%
28%	10%	-
29%	15%	38%
18%	16%	-
23%	24%	-
18%	22%	21%
26%	17%	43%
14%	17%	33%
17%	12%	18%

Mereka yang **sangat tidak yakin** pemerintah dapat memenuhi programnya signifikan berasal dari tingkat pendidikan perguruan tinggi (19%) dan SES A (15%)

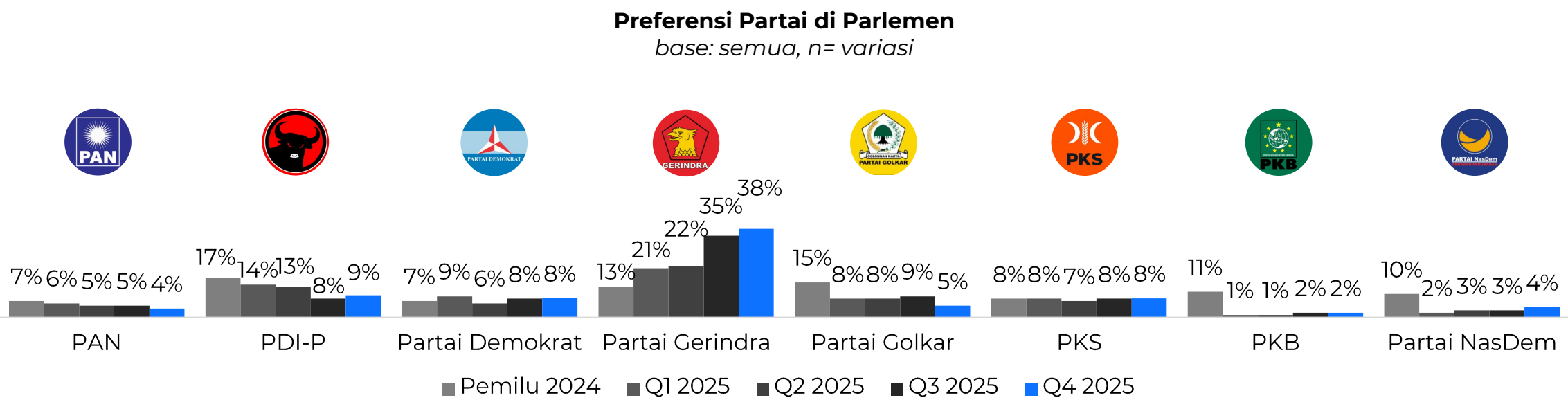
Alasan tidak yakin dengan pemerintah dalam memenuhi program karena isu **keterlibatan militer** signifikan lebih sedikit dipilih oleh mereka yang berusia 35-44 tahun (12%)

Alasan tidak yakin dengan pemerintah dalam memenuhi program karena isu **nepotisme** signifikan dipilih oleh masyarakat perkotaan (39%)

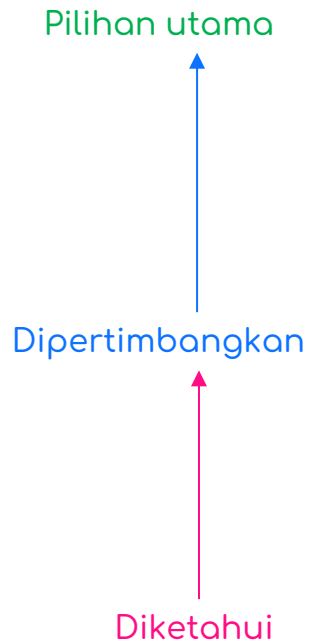
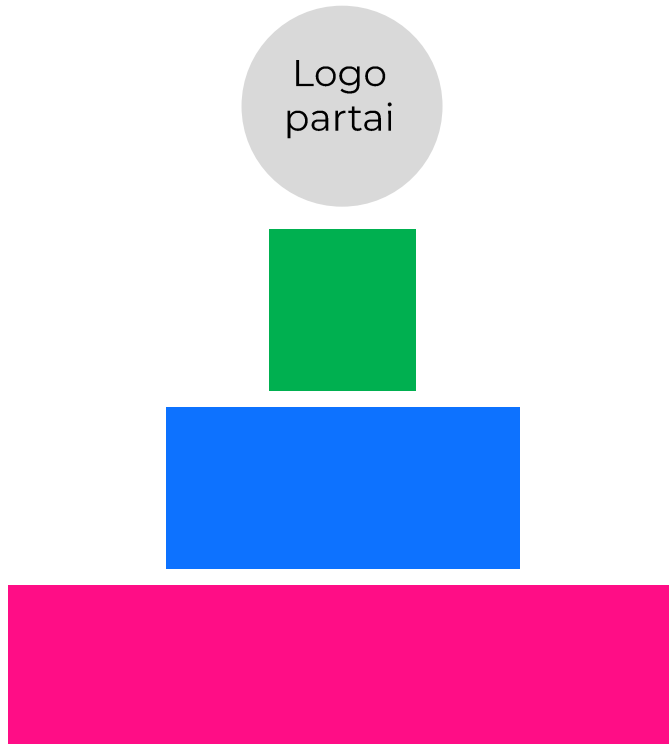


5 Pantauan Partai Politik

Suara Gerindra sepanjang 2025 terus meningkat dibandingkan dengan perolehan Pemilu 2024. Di sisi lain, preferensi masyarakat terhadap partai politik lain kian menurun — kecuali PKS yang cenderung stabil.



Cara membaca *funnel* partai politik



Persentase responden yang benar-benar memilih partai ini sebagai pilihan utama mereka. Responden yang bisa menjadikan partai tersebut sebagai pilihan utama hanya responden yang mempertimbangkan partai tersebut.

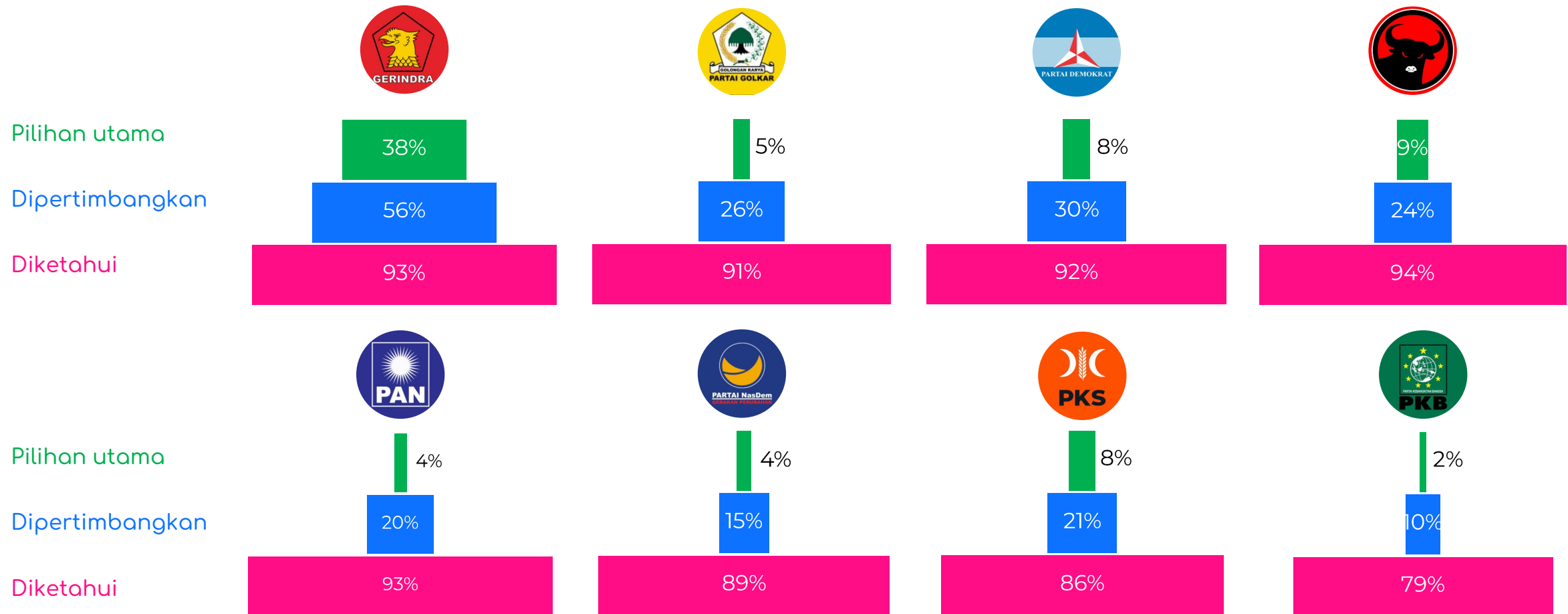
Persentase responden yang mempertimbangkan untuk memilih partai tersebut. Responden yang bisa mempertimbangkan partai tersebut hanya responden yang mengetahui partai tersebut.

Persentase responden yang mengenal partai ini, meskipun hanya sekadar tahu namanya. Semakin tinggi nilai persentase maka semakin dikenal partai tersebut.

Jika Pemilu diadakan hari ini, PKB (2%) tidak akan mendapatkan kursi di Senayan dan Partai Gerindra (38%) menjadi partai dengan suara terbanyak.

Pantauan Partai Politik di Parlemen

base: semua, n= variasi



Q1 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?

Q3 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang kamu pertimbangkan untuk pilih?

Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?

Preferensi Partai Politik per Kuartal

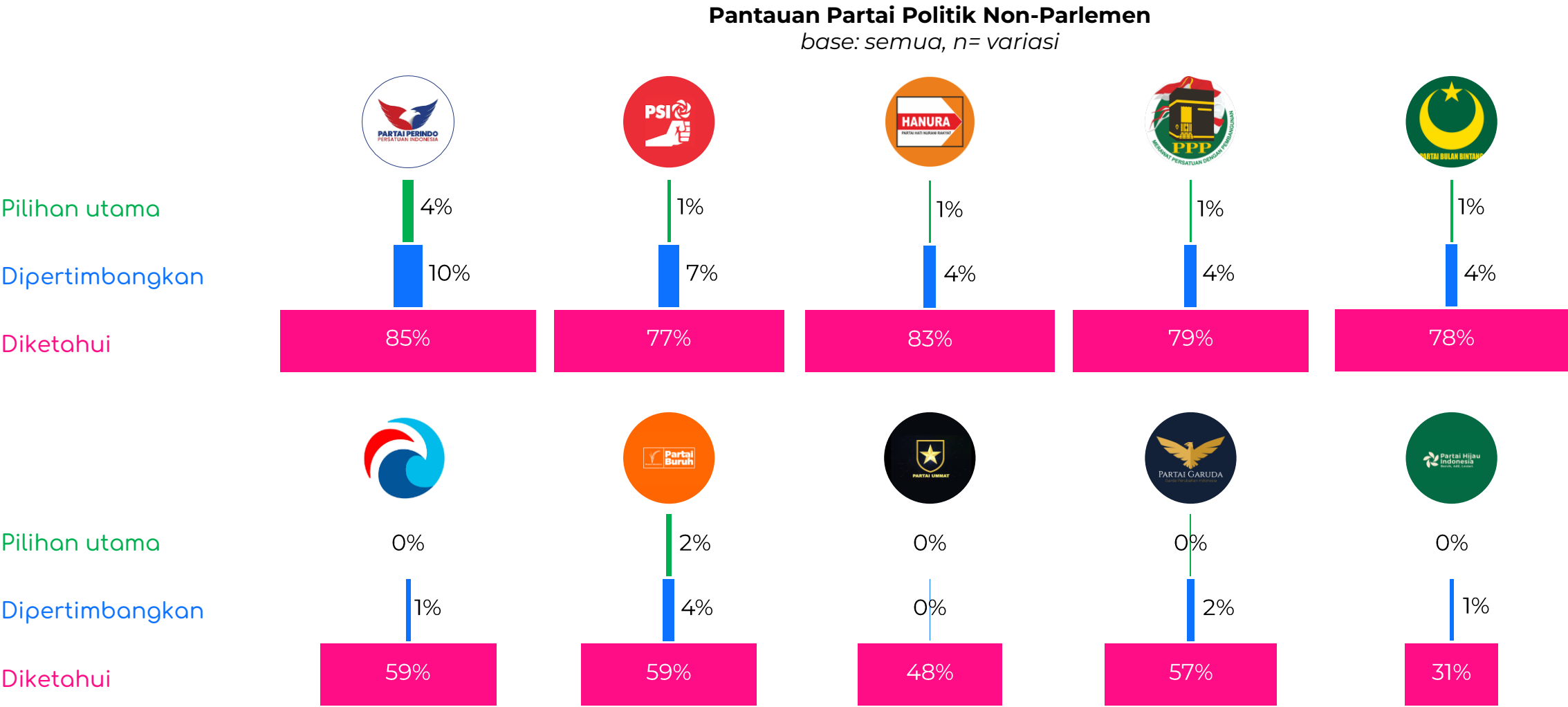
Perbandingan Preferensi Partai Politik di Parlemen
base: semua, n= variasi

Partai Politik	Diketahui				Dipertimbangkan				Pilihan Utama			
	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025
Partai Gerindra	93%	96%	95%	95%	56%	56%	42%	50%	38%	35%	22%	21%
Partai Golkar	91%	92%	93%	86%	26%	31%	23%	22%	5%	9%	8%	8%
Partai Demokrat	92%	92%	90%	89%	30%	29%	20%	22%	8%	8%	6%	9%
PDIP	93%	96%	88%	95%	24%	21%	21%	30%	9%	8%	13%	14%
PAN	93%	93%	86%	91%	20%	23%	17%	23%	4%	5%	5%	6%
Partai NasDem	89%	91%	84%	88%	15%	15%	11%	17%	4%	3%	3%	2%
PKS	86%	84%	81%	78%	21%	8%	16%	20%	8%	8%	7%	9%
PKB	79%	77%	78%	76%	10%	2%	5%	12%	2%	2%	1%	1%

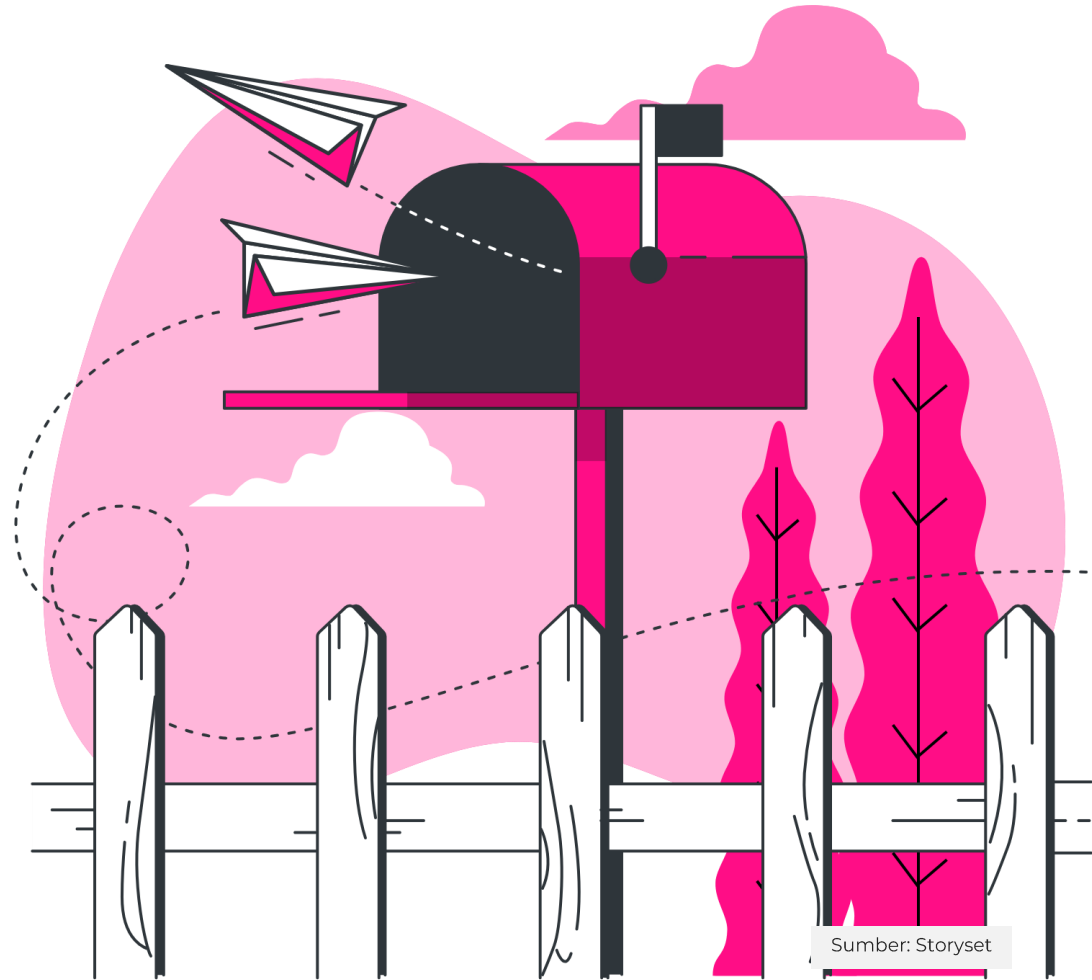
Naik signifikan dari Q3 2025

Q1 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?
 Q3 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang kamu pertimbangkan untuk pilih?
 Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?

Jika Pemilu dilaksanakan saat ini, Partai Perindo menjadi partai non-parlemen yang memiliki kemungkinan lolos ke Senayan (4%).



Q1 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?
Q3 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang kamu pertimbangkan untuk pilih?
Q4 Jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan menjadi pilihan utamamu?



⑥ Opini Masyarakat dalam RUU Berjalan

Indeks Partai Politik

Indeks Partai Politik adalah sistem penilaian yang mengukur sejauh mana sikap partai politik selaras dengan preferensi masyarakat terhadap suatu isu. Skor diberikan berdasarkan tingkat kesesuaian posisi partai dengan opini publik, di mana partai yang lebih selaras dengan mayoritas masyarakat mendapat skor lebih tinggi, sementara yang berseberangan mendapat skor lebih rendah.

Indeks Partai Politik pada NKS Q3 2025 ditentukan berdasarkan sikap partai politik dan opini masyarakat terhadap RKUHAP, RUU Kehutanan, RUU BUMN, RUU Polri, RUU Pangan, RUU Perampasan Aset, dan RUU Penjiaran.



Sejalan dengan Q3, PDIP masih memperoleh skor indeks partai tertinggi (43,2), menunjukkan relevansinya dengan aspirasi masyarakat.

Indeks Partai Politik Parlemen

base: semua, n= 400

Partai Politik	Skor Indeks Q4	Skor Indeks Q3	Skor Indeks Q2	Skor Indeks Q1
Partai Demokrat	20,5	42,0	37,8	35,5
Partai NasDem	23,8	28,6	37,8	61,0
PKB	30,8	39,1	37,6	61,0
PDIP	43,2	51,2	36,5	28,9
Partai Golkar	25,0	31,2	36,5	31,1
PKS	27,8	47,6	35,5	61,1
Partai Gerindra	25,0	47,6	31,7	46,2
PAN	20,8	41,9	27,9	35,6

Program Legislasi Nasional (Prolegnas)



Setiap undang-undang (UU) yang akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melalui proses atau tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Proses pembentukan tersebut dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sendiri **merupakan daftar rencana pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang disusun berdasarkan program pembangunan nasional**. Prolegnas terbagi menjadi dua, yaitu Prolegnas Prioritas Tahunan dan Prolegnas Jangka Menengah. **Prolegnas menjadi acuan untuk daftar UU yang akan dibahas dalam satu atau lima tahun ke depan**. Oleh karena itu, pembahasan UU yang berjalan dalam satu dan lima tahun ke depan akan merujuk pada daftar yang telah ditetapkan dalam Prolegnas.

Meskipun pembahasan UU harus mengacu pada daftar yang telah disepakati dalam Prolegnas, terdapat pengecualian untuk bisa memasukkan UU yang dianggap mendesak di luar daftar Prolegnas, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU P3.

Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan dan Jangka Menengah sendiri harus disertai dengan adanya naskah akademik dan RUU, sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Setiap proses pembahasan RUU dalam Prolegnas perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Oleh karena itu, **keterbukaan informasi, akses publik terhadap dokumen pembahasan, serta ruang partisipasi yang inklusif menjadi prasyarat penting** dalam menjaga legitimasi dan kualitas pembentukan UU.

7 dari 10 masyarakat menentang penguatan kewenangan pemerintah tanpa pengawasan jelas, sementara semua partai parlemen mendukungnya.



Pengawasan atas kasus hukum tidak perlu rumit, karena dapat memperlambat proses penegakan hukum

Netral

Pengawasan yang jelas diperlukan agar penegakan hukum tidak sewenang-wenang

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah upaya pembaruan KUHAP yang sudah tua, bertujuan menyempurnakan prosedur penegakan hukum di Indonesia. Namun, pembahasannya masih diwarnai pro-kontra:

1. **Pembatasan Hak Tersangka/Terdakwa:** Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi pembatasan hak bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa, terutama di tahap awal proses.
2. **Kewenangan Penahanan dan Penyadapan:** RKUHAP juga menjadi sorotan terkait perluasan kewenangan penahanan tanpa persetujuan pengadilan dalam kasus-kasus tertentu, serta aturan penyadapan yang dianggap masih abu-abu dan berpotensi disalahgunakan tanpa pengawasan yang ketat.

RKUHP diharapkan membawa perbaikan signifikan dalam sistem peradilan pidana, namun kontroversi seputar hak asasi, pengawasan, dan potensi penyalahgunaan kewenangan masih menjadi tantangan besar dalam proses penyusunannya.

Terkait kebijakan kehutanan, 3 dari 5 orang menekankan perlindungan lingkungan jangka panjang.



Pemerintah seharusnya lebih fokus pada pemanfaatan sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi

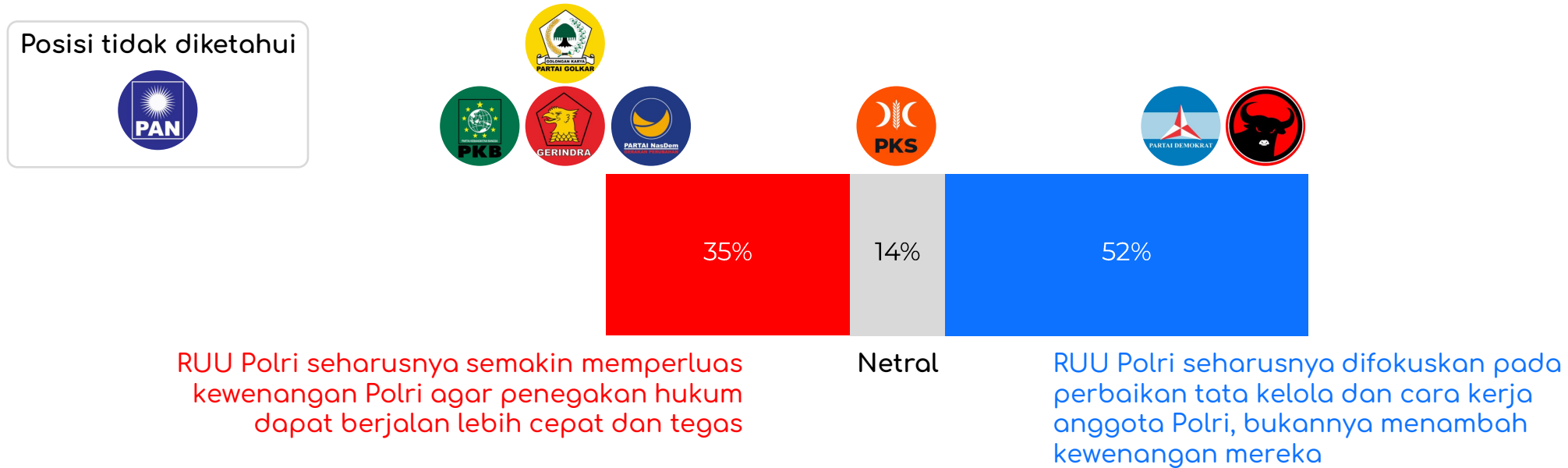
Netral

Pemerintah perlu lebih menekankan perlindungan lingkungan jangka panjang dalam kebijakan kehutanan

RUU Kehutanan adalah inisiatif legislasi penting yang bertujuan untuk merevisi atau mengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Revisi UU Kehutanan didesak untuk mengubah paradigma kehutanan dari eksploitasi ekonomi menjadi keadilan ekologis dan pengakuan hak masyarakat adat.

- 1. Pengakuan Hak Masyarakat & Tata Kelola:** menuntut pengakuan Hutan Adat sebagai status tersendiri, memberi kepastian hukum bagi masyarakat adat, serta mendorong desentralisasi kewenangan dengan melibatkan pemerintah daerah dan komunitas lokal.
- 2. Perlindungan Ekologis & Penegakan Hukum:** RUU menegaskan kewajiban menjaga luas hutan minimal 30%, mengadopsi prinsip kehati-hatian (FPIC), melarang konversi besar-besaran, serta menolak pelemahan penegakan hukum melalui sanksi administratif semata.

Sebagian masyarakat menilai RUU Polri seharusnya difokuskan pada perbaikan tata kelola dan kinerja anggota Polri daripada peluasan wewenang.

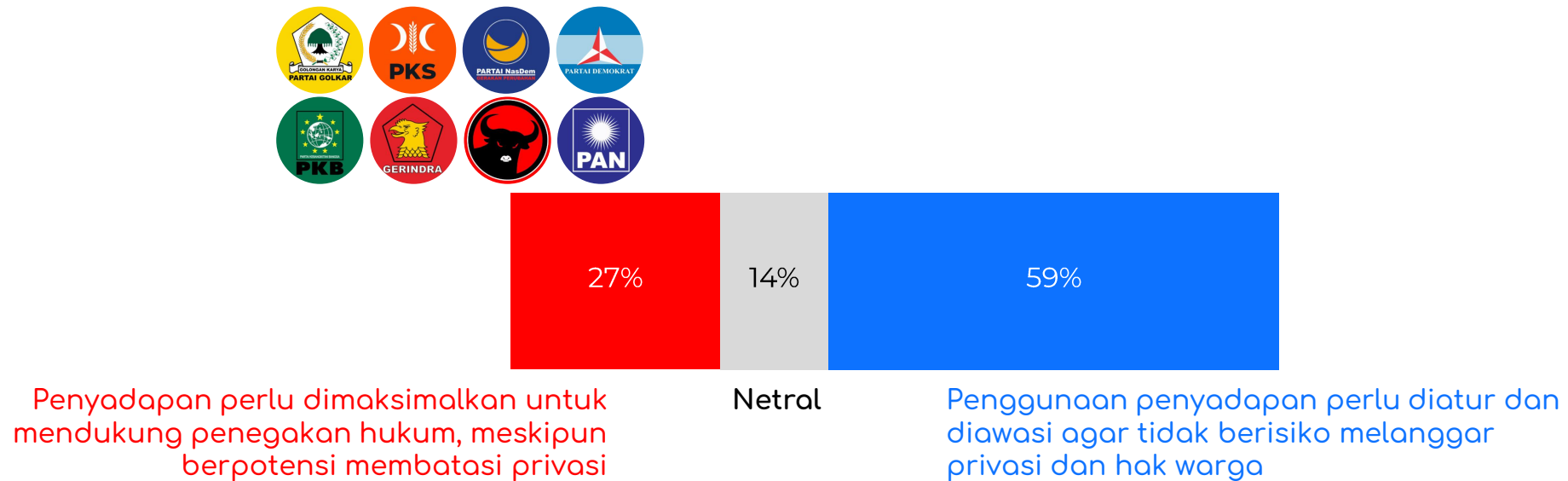


RUU Polri adalah inisiatif mendadak DPR di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, yang awalnya tidak masuk Prolegnas. Isi dari UU ini berfokus pada perluasan wewenang dan penataan ulang struktur Polri.

- Perpanjangan Usia Pensiun:** dinilai bisa mempertahankan SDM berpengalaman di posisi strategis, tetapi dikhawatirkan memperlambat regenerasi dan menambah penumpukan perwira tinggi.
- Kewenangan Penyadapan & Siber:** dianggap penting untuk menghadapi kejahatan siber dan terorisme, namun berpotensi mengancam privasi, kebebasan berekspresi, dan rawan disalahgunakan tanpa pengawasan jelas.

RUU Polri ini masih dalam tahap pembahasan, meski banyak pihak yang mengkritisi isi RUU tersebut.

59% masyarakat menekankan perlunya aturan dan pengawasan yang jelas terhadap penggunaan penyadapan.

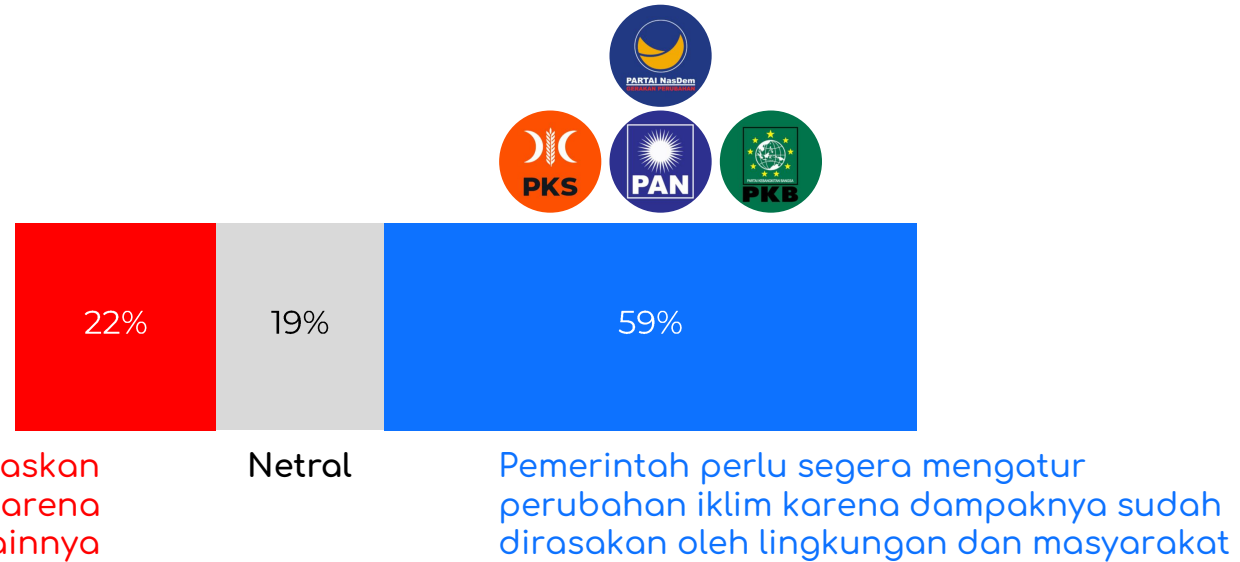


RUU Penyadapan adalah inisiatif legislasi untuk mengatur penyadapan dalam lingkup penegakan hukum dan kegiatan intelijen dengan mencakup syarat, mekanisme, pengawasan, jangka waktu, hasil, sanksi, serta perlindungan hak asasi manusia.

- 1. Penyadapan Sejak Penyelidikan:** penyadapan dapat dilakukan sejak penyelidikan terutama untuk kasus korupsi karena korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan langkah cepat.
- 2. Pusat Penyadapan Nasional:** dianggap penting untuk menghadapi kejahatan siber dan terorisme, namun berpotensi mengancam privasi, kebebasan berekspresi, dan rawan disalahgunakan tanpa pengawasan jelas.

RUU Penyadapan ini masih dalam pembahasan dan diharapkan segera disahkan, meski banyak pihak yang mengkritisi isi RUU tersebut.

Setidaknya 3 dari 5 orang menekankan bahwa pemerintah perlu segera mengatur tentang perubahan iklim karena dampaknya sudah terasa.

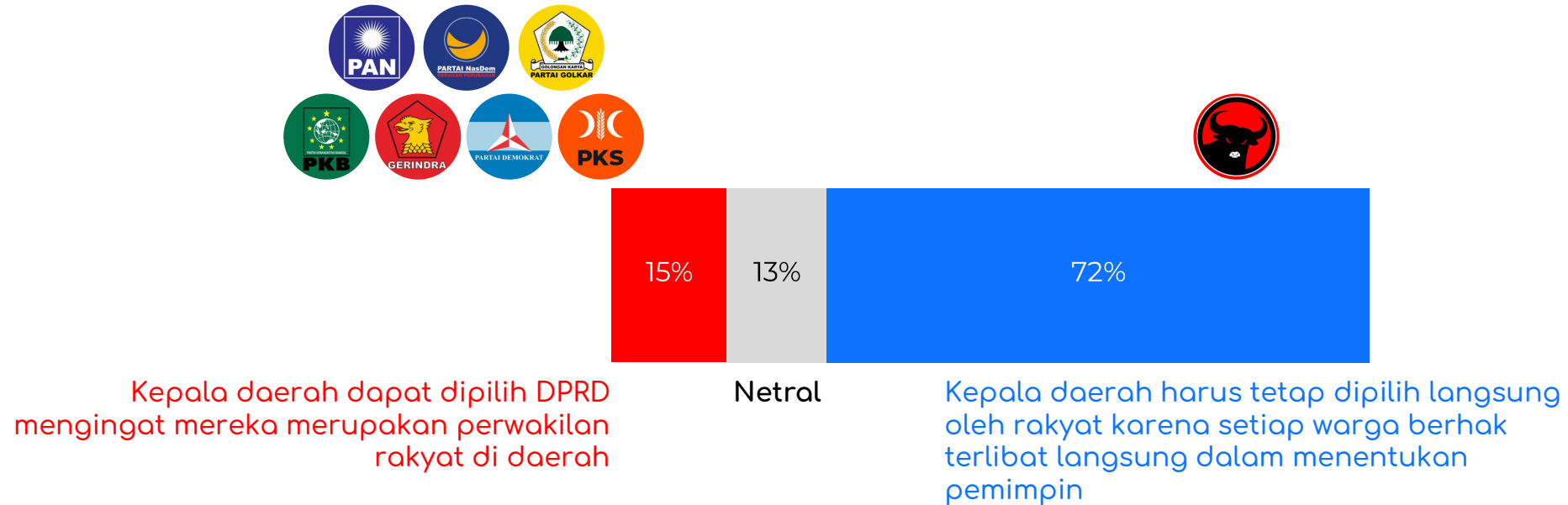


RUU Pengelolaan Perubahan Iklim adalah inisiatif legislasi penting yang bertujuan untuk penanganan dan pencegahan dampak perubahan iklim yang hingga saat ini kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim masih terpisah-pisah.

- Menyatukan Arah Kebijakan Iklim:** dipandang dapat menjadi payung kebijakan terhadap pengelolaan terkait perubahan iklim yang hingga saat ini masih terpisah-pisah.
- Mencegah dan Mengelola Perubahan Iklim:** dianggap penting untuk menghadapi dampak perubahan iklim dengan upaya pencegahan dan pengelolaan atas dampak dari perubahan iklim.

RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini sedang dibahas di dalam Badan Legislasi DPR RI dan diharapkan untuk dapat segera dirampungkan.

Sebagian besar masyarakat menekankan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, bukan oleh DPRD.



RUU Pilkada adalah inisiatif legislasi yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah dan DPRD, muncul wacana kepala daerah dipilih melalui DPRD.

- Kepala Daerah Dipilih DPRD:** terdapat wacana kepala daerah dipilih melalui DPRD, sehingga tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat.
- Menekan Biaya Politik:** perubahan uu pilkada direncanakan untuk berupaya menekan biaya politik dengan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

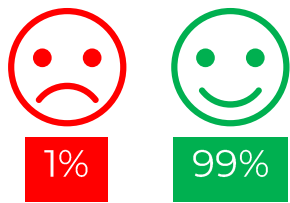
RUU Pilkada tidak jadi masuk dalam Prolegnas 2026 dan dipisahkan pembahasannya dengan RUU Pemilu yang awalnya direncanakan dalam Paket RUU Pemilu bersama dengan RUU Pemilu dan RUU Partai Politik.



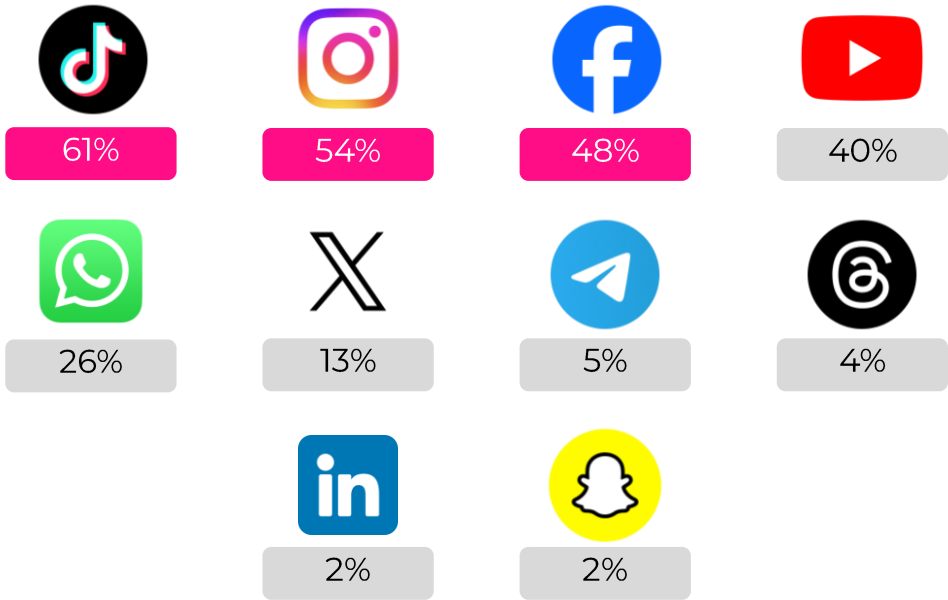
7 Persepsi Masyarakat Terhadap Banjir-Longsor di Sumatera

Mayoritas masyarakat yang mengetahui bencana banjir-longsor, menerima informasi dari media sosial (82%) dan televisi (57%).

Mengetahui bencana banjir-longsor
base: mengetahui bencana, n=400



Media sosial sumber informasi bencana banjir-longsor
base: mengetahui lewat media sosial, n=324



Sumber informasi bencana banjir-longsor
base: mengetahui bencana, n=396

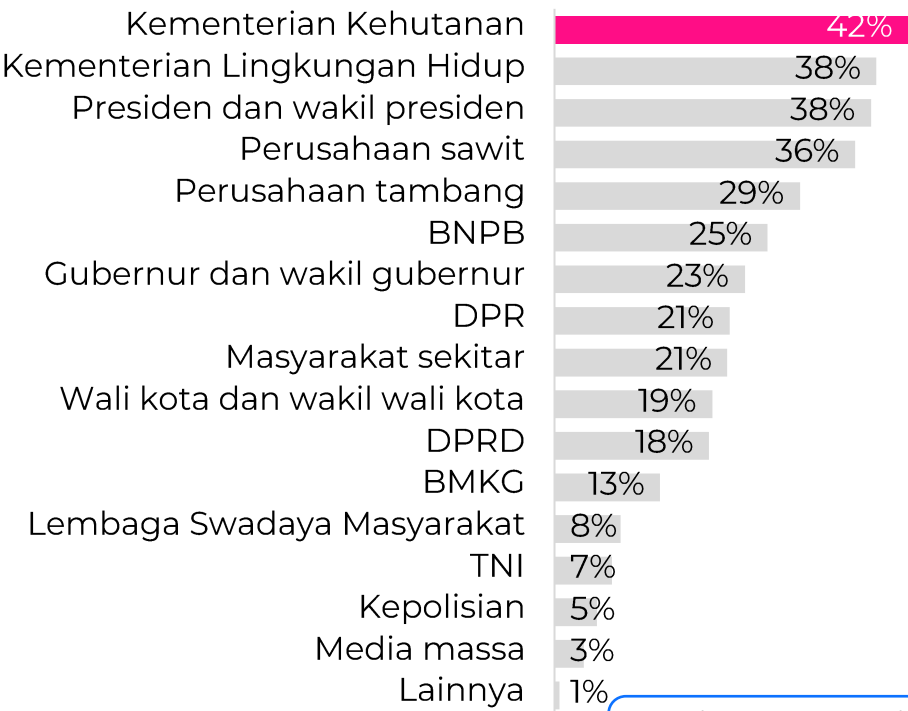
Sumber informasi	Total
Media sosial	82%
Televisi	57%
Artikel berita online	30%
Teman atau keluarga	21%
Tempat kerja	7%
Komunitas atau organisasi	6%
Sekolah atau kampus	5%
Koran/majalah	4%
Radio	2%

bb01 Apakah Anda mengetahui bencana banjir-longsor yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, terutama Pulau Sumatera, belakangan ini?
 bb02_mr Bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang banjir-longsor tersebut?
 bb02a_mr Manakah kanal media sosial dan komunikasi yang Anda gunakan untuk mendapatkan informasi mengenai banjir-longsor tersebut?

Kementerian Kehutanan (42%) dinilai menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas bencana banjir-longsor di Sumatera.

Pihak yang bertanggung jawab terhadap penyebab banjir-longsor di Sumatera

base: semua, n= 400

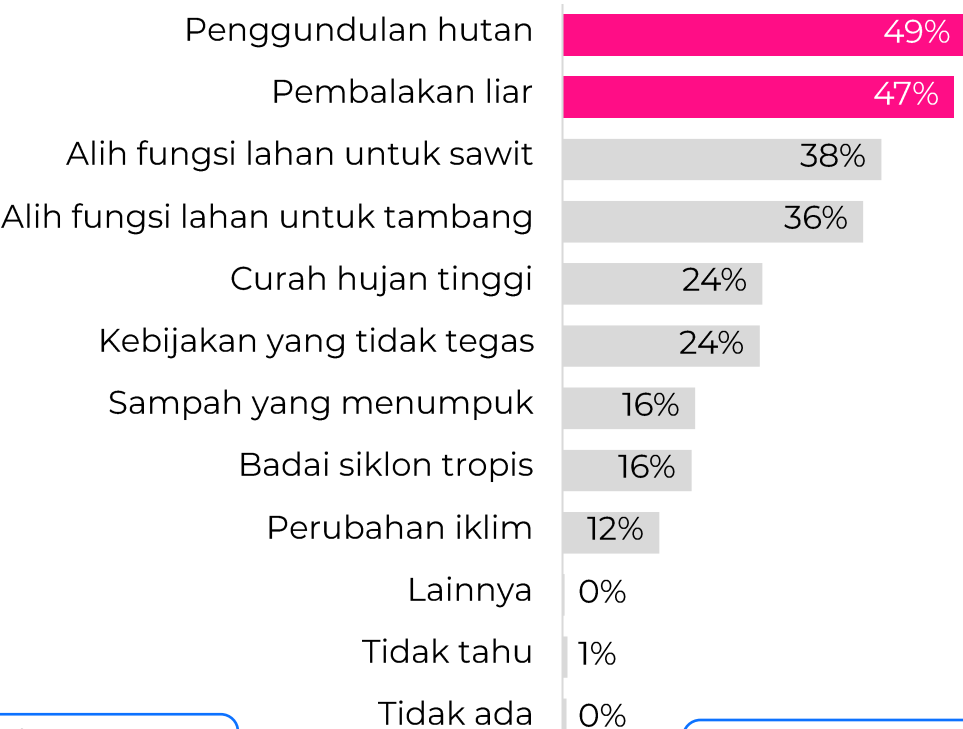


Kementerian Kehutanan signifikan dianggap bertanggung jawab oleh mereka yang menilai kinerja Prabowo tidak cukup (53%), (sangat) tidak yakin (61%), dan (sangat) progresif (68%)

Presiden dan wakil presiden signifikan dianggap bertanggung jawab oleh mereka yang menilai kinerja Prabowo (sangat) buruk (56%) dan tidak cukup (46%), (sangat) tidak yakin (55%), serta tinggal di perkotaan (42%)

Faktor yang memicu banjir-longsor di Sumatera

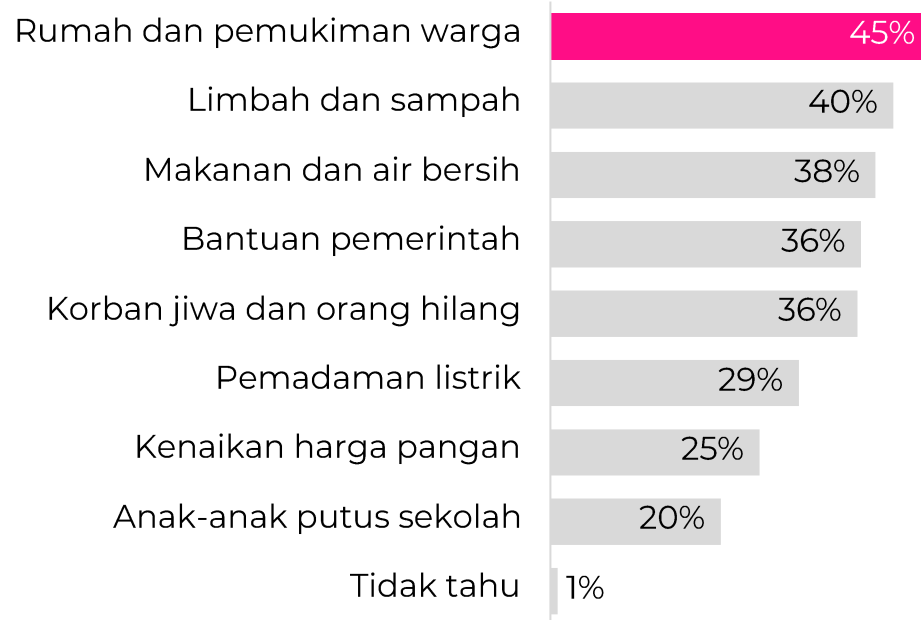
base: semua, n= 400



Penggundulan hutan secara signifikan dianggap sebagai factor pemicu oleh mereka yang (sangat) tidak yakin dengan program Prabowo (60%) dan mereka yang (sangat) progresif

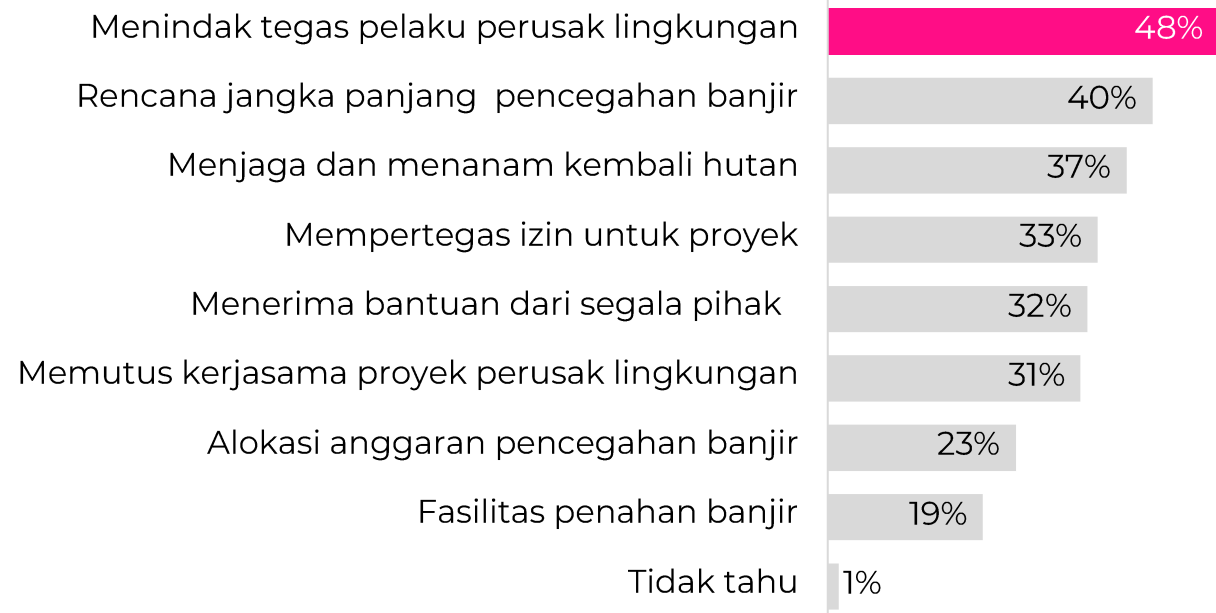
Pemukiman warga terdampak bencana (45%) menjadi isu yang perlu segera diselesaikan. Masyarakat ingin tindakan tegas bagi perusak lingkungan (48%).

Isu banjir-longsor di Sumatera yang perlu segera diselesaikan base: semua, n= 400



Kurangnya pasokan makanan dan air bersih secara signifikan dipilih oleh mereka yang (sangat) tidak yakin (52%) terhadap kinerja dan mereka yang (sangat) progresif (50%)

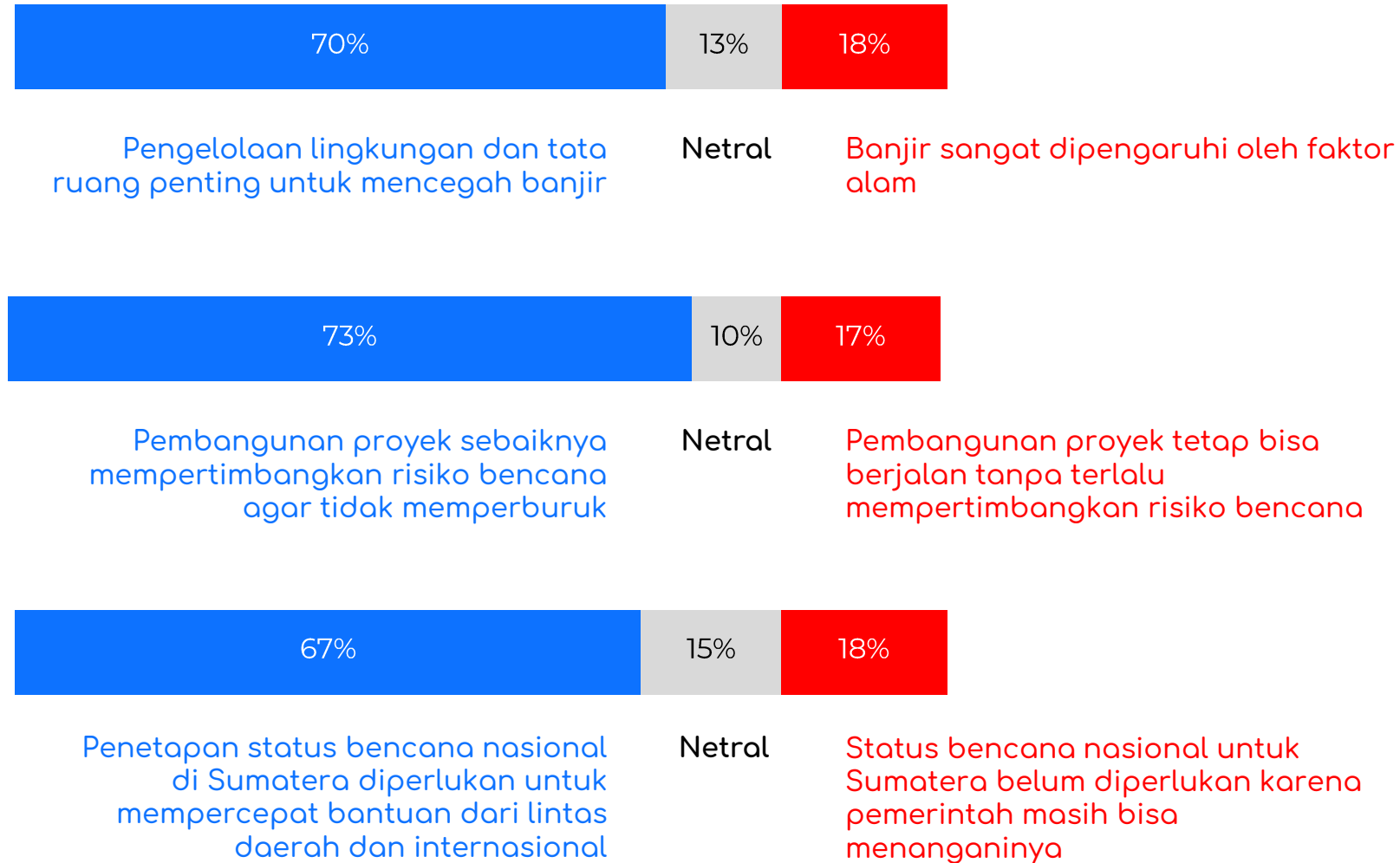
Upaya penanganan banjir-longsor di Sumatera yang penting untuk dilakukan base: semua, n= 400



Alokasi anggaran pencegahan banjir dianggap sebagai upaya penting bagi mereka yang tinggal di pedesaan (28%)

Membangun fasilitas penahan banjir secara signifikan dipilih oleh mereka yang (sangat) konservatif (60%)

Mayoritas masyarakat sepakat penanganan banjir harus berfokus pada pencegahan, mitigasi, dan percepatan bantuan pasca bencana.



Mereka yang memilih alasan banjir sangat dipengaruhi **oleh faktor alam** lebih banyak dari wilayah Sumatera (30%)

Pengelolaan lingkungan yang dapat mencegah banjir secara signifikan dipilih oleh mereka yang agak progresif (76%) dan (sangat) progresif (96%)

Pertimbangan risiko bencana saat Pembangunan secara signifikan dipilih oleh mereka yang agak progresif (80%) dan (sangat) progresif (95%)

Mereka yang menilai **penetapan status bencana nasional di Sumatera diperlukan**, lebih sedikit yang berasal dari wilayah Sumatera (58%) dan secara signifikan dipilih oleh mereka yang agak progresif (76%) dan (sangat) progresif (91%)